



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI X DPR RI
DENGAN FORUM KOMITE SMA DAN KEJURUAN KABUPATEN
BANYUWANGI SERTA FKSMKPI**

- Nama Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI Dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kab. Banyuwangi, serta FKSMKPI
- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : IV (Empat)
- Rapat ke- : -
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
- Waktu : 11.18 WIB – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI
- Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. / F-P. Demokrat
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI
- Acara : 1. Penyampaian aspirasi terkait masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi;
2. Berdiskusi tentang masa depan SMK Penerbangan.
3. Lain-lain.
- Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih., M.M.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Dr. Andreas Hugo Pareira.

F-P.GOLKAR :

1. H. Muhammad Nur Purnamasidi

F-P.GERINDRA:

-

F-P.NASDEM :

1. Moh Haerul Amri.,SP.

F-PKB :

-

F-P.DEMOKRAT :

-

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah.,S.Si.,M.Psi.

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki.,M.Si.
2. Desy Ratnasari.,M.Si.,M.Psi.

F-PPP :

-

UNDANGAN :

1. Ketua Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (Makmur Syukra)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama izinkan kami menyampaikan selamat datang kepada forum SMAKN, SMA dan SMKN Kabupaten Banyuwangi sudah hadir di sini, kemudian juga selamat datang kepada Ketua dan pengurus Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia FKSMKPI dan juga tentu saja Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati.

Sebelumnya kita buka dulu rapat ini, RDPU ini secara resmi dan terbuka untuk umum dengan mengucap "*bismillahirrahmanirrahim*".

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.18 WIB)

Baik.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Di dalam agenda RDPU ini adalah menampung, menerima aspirasi dari masukan masyarakat terutama. Memang kalau di Komisi X itu paling banyak menerima aspirasi kebanyakan dari guru, *nah* kali ini dari forum SMA dan SMK. Ini komite sekolah? Forum komite, baik. Ini jarang ini kalau komite sekolah ini jarang baru sekarang. Berarti ini adalah orang tua siswa ya, kebanyakan orang tua siswa, kalau ini adalah dari kepala sekolah *jenengan*? Baik.

Jadi untuk itu, hari ini kita akan mendengarkan pengaduan atau aspirasi masukan-masukan dari Bapak, Ibu semua, terutama yang terkait dengan mutu pendidikan, proses pendidikan, biaya pendidikan dan juga mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Termasuk juga komite sekolah ini merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dari satuan pendidikan, baik.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Saya tawarkan kita sampai pukul jam 1 dulu, bagaimana cukup? Nanti kita lanjut kalau memang masih butuh waktu yang lebih lama lagi.

Oke telah hadir di sini ada dua, pertama Forum Komunikasi SMK penerbangan Indonesia, Bapak Ketuanya adalah Bapak Drs. Makmur Syukra, betul Pak? Diwakili juga ada Bapak Yahya Iskandar, Wakil Ketua SM, FKSMKPI, kemudian ada Ibu Fani Desiyanto, oh Bapak, Bapak Fani Desiyanto Sekjen, kemudian Ibu Sri Tri Purwaningsih bendahara, kemudian Ibu Desi Rosarina koordinator humas, kemudian ada Bapak Ahmad Budiman koordinator kurikulum. Kemudian Bapak Yusrizal Fadli anggota wilayah barat,

Bapak Redi Karyanusa anggota wilayah tengah, Bapak Hen, Bapak Heni, Ibu nih, Ibu Heni Heliani anggota wilayah tengah juga Bu ya. Kemudian Bapak Siman Hadi wilayah timur, Bapak Yudiansah anggota wilayah barat dan Bapak Toni Sudaryana wilayah barat, sudah tersebut semuanya, sudah ya.

Lalu kemudian dari perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi yang diketuai oleh Bapak Misnadi, Bapak Misnadi, kemudian Bapak Drs. Karimulah sekretaris, ada, hadir ya, ya, kemudian Bapak Nanang Nur Ahmadi bendahara, Bapak Suburyanto Anggota, Bapak Supriadi Anggota, Bapak Wawan Kurnia Anggota, Bapak Edi Imam Supeno Anggota, Bapak Abdul Jabar Anggota, Bapak Mujiono Anggota, Bapak Suyoto Mahmud Saleh Anggota, Bapak Yudianto Anggota, Bapak M. Mansyur Anggota, Bapak Mawardardi Anggota, sudah semua kami sebutkan, baik.

Terima kasih.

Selanjutnya kita akan mendengarkan, *nah* aspirasi dari Bapak, Ibu semua, kita mulai dari SMK dulu penerbangan ya, ini SMK penerbangan agak unik ini karena yang dipelajari adalah tentang penerbangan. Saya paham, salah satu SMK yang jenis peralatannya paling mahal antara lain adalah penerbangan. Jadi kami persilakan Pak Ketua untuk memberikan aspirasi, selanjutnya nanti dari Forum Komite Sekolah.

Silakan Pak.

KETUA FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (MAKMUR SYUKRA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izin Pimpinan, kami mohon aspirasi kami bisa didengar karena permasalahan SMK di Indonesia khusus kami penerbangan merasa dianak tirikan dalam pendidikan penerbangan dari SMK yang ada di Indonesia.

Jadi banyak hal barangkali kami keluh kesah nantinya, tapi mungkin saya sebagai Ketua menyerahkan kepada Pak Sekjen yang lebih banyak tahu kegiatan-kegiatan kita ini, mungkin kepada Pak Fani Sekjen langsung disampaikan ini barang.

Izin, Pimpinan.

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izin, Bapak Pimpinan sidang.

**Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi X beserta Anggota Dewan,
Serta Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini,**

Izinkan saya untuk membacakan sedikit materi tentang kilas balik SMK penerbangan Indonesia. Mohon izin sebelumnya kami dari SMK penerbangan itu total jumlahnya adalah 48 sekolah, Bapak. Iya dari Sabang sampai Merauke kebetulan yang ikut yang saat ini ada sama kita adalah dari Aceh juga, kebetulan yang dari Papua kemarin mengalami kecelakaan jadi tidak bisa ikut hadir bersama kita.

Untuk beberapa tahun terakhir Bapak, sebenarnya kami mengalami masalah yang sangat luar biasa karena kami jumlahnya minoritas. Oleh karena itu, mungkin juga kami agak tersingkirkan begitu, tapi kami tetap masih bagaimana berupaya menciptakan atau menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa berdaya guna untuk meneruskan perawatan pesawat terbang.

Bapak, Ibu yang saya hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa, di SMK penerbangan ini saat ini ada tujuh program studi yang kemudian akhirnya dilebur menjadi dua. Akhirnya sekarang untuk kompetensi teknologi pusat udara ada dua yaitu; pemeliharaan rangka dan mesin pesawat terbang, kemudian yang kedua adalah tentang elektronika dan avionik pesawat terbang, yang tadinya ada tujuh jadi sekarang menjadi dua.

Kenapa SMK penerbangan ini ada? Karena melihat dari letak strategis Indonesia yang merupakan ribuan pulau yang mungkin secara transportasi sangat memungkinkan untuk bisa kita raih dengan cepat untuk menuju satu tempat ke tempat yang lain adalah dengan menggunakan pesawat terbang dan salah satu program yang kami jalankan adalah mendidik anak-anak yang tamatan SMP untuk kita didik menjadi calon teknisi pesawat terbang.

Dengan adanya peluang sebenarnya yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan tentang peluang kerja untuk mendukung adanya pariwisata dan kawasan ekonomi khusus, akhirnya kami juga mendapatkan beberapa pertimbangan bagaimana untuk mengembangkan SMK penerbangan.

Kemudian kita lihat yang selanjutnya, *next*, slide selanjutnya.

Ini kita mendapatkan referensi dari Kementerian Perhubungan tentang rencana pengembangan untuk mendukung pariwisata. Jadi kita bisa lihat di *slide* bahkan di materi itu ada beberapa bandara yang dibuka dan sebenarnya ini memiliki potensi daripada peluang kerja bagi anak-anak SMK penerbangan. Hanya masalahnya adalah saat ini juga pemerintah belum membuka untuk jurusan tentang bagaimana manajemen transportasi atau untuk jurusan *ground handling*. Sebenarnya ini dibutuhkan Bapak, tapi sementara ini kita sudah mengusulkan ke Kemendiknas, ke Direktorat SMK tapi sampai saat ini juga belum bisa direalisasikan padahal sebenarnya kebutuhannya sangat banyak

terkait dengan adanya rencana pemerintah akan membuka beberapa bandara baru di Indonesia berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan.

Kemudian *slide* selanjutnya, *slide* selanjutnya adalah kita bisa melihat bagaimana pergerakan kargo yang artinya salah satu komponen daripada pendukung transportasi udara yaitu kargo, di mana kargo tersebut menggunakan pesawat terbang dan jumlahnya saat ini sangat banyak sekali dilihat daripada jumlah pesawat yang mengangkut kargo tersebut, juga dengan pergerakan penumpangnya. Kita lihat juga ini di *slide* selanjutnya adalah pergerakan penumpang ya yang ada di luar negeri berdasarkan dari maskapai penerbangan.

Kemudian yang selanjutnya adalah kami juga mendapatkan data daftar badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk tahun 2023. Jadi data ini kami ambil berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Di sini terdapat untuk jumlah perusahaannya adalah sebanyak 24 perusahaan, mohon maaf ada sejumlah 20 perusahaan ya yang niaga berjadwal, kemudian untuk yang bukan niaga tahun 2023 itu sejumlah 40 perusahaan. Sebenarnya ini sangat peluang Pak, tetapi nanti ini akan saya sampaikan secara detail kenapa kita sekarang jadi apa, jadi sekolah yang sangat menyedihkan begitu Pak ya untuk terutama serapannya.

Nah kemudian di sini ada di grafik selanjutnya, *next*. *Nah* ini bisa kita lihat rekapitulasi rute domestik. Sebenarnya kalau ini juga dapat dari Kementerian Perhubungan yaitu Dirjen Perhubungan Udara tahun 2023, ini sesuai dengan data yang kita dapatkan sebenarnya pesawat itu banyak ya trans apa? Arus daripada penerbangannya banyak dan tentu saja kalau seandainya penerbangannya banyak membutuhkan SDM untuk menangani pesawat terutama pada saat berada di *ground* atau berada di bandara untuk *handle* transit. Kemudian untuk *maintenance* juga pasti dibutuhkan, kenapa? Karena pesawat itu kan perawatannya berdasarkan jam terbang, jadi rusak tidak rusak tetap harus ada perawatan.

Next.

Kemudian untuk lulusan SMK penerbangan Bapak, sampai dengan tahun 2023 kita mendapatkan data bahwa hanya 15% alumni kita SMK penerbangan yang berhasil diserap oleh industri, kemudian yang sisanya 45% itu bekerja di bidang lain karena merasa putus asa, kemudian yang 40% saat ini masih *jobless* atau masih mencari pekerjaan.

Karena begini Bapak, sebenarnya anak-anak SMK penerbangan ini kan mereka tujuan utamanya adalah setelah lulus itu bekerja, *nah* tetapi dengan kondisi yang ada saat ini di-*next*, di-*next*-nya di-*slide* *next*-nya Pak, ternyata perusahaan itu membutuhkan teknisi atau alumni yang memiliki sertifikat atau kecakapan *basic license*. *Nah* ini ini juga di mana SMK sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu CSR 4145 itu wajib untuk semua personil perawatan pesawat terbang memiliki sertifikat kecakapan pesawat terbang, itu wajib Bapak.

Nah kalau dulu pada tahun 2010 sampai dengan 2016 ramai-ramai semua perusahaan industri penerbangan itu mendatangi SMK penerbangan untuk mereka merekrut anak-anak kami, kemudian mereka setelah lulus langsung jadi karyawan, disekolahkan *basic license* oleh perusahaan, itu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dapat kami sampaikan bahwa, itulah sementara masa kejayaan SMK penerbangan.

Nah kemudian yang selanjutnya adalah dukungan industri penerbangan dalam memberikan *link and match* kepada SMK penerbangan itu belum maksimal Bapak, terutama untuk OJT. OJT kami juga masih mengalami masalah karena ada beberapa perusahaan yang tidak berkenan menerima SMK penerbangan, jadi menerimanya hanya D3, *nah* itu Bapak ya.

Kemudian industri penerbangan, mereka sejak 2016 yang saya sampaikan tadi lebih memilih lulusan Diploma III. Jadi pernah kita sampaikan dan pernah kita tanyakan kepada beberapa industri penerbangan kenapa mengambilnya D3 Pak, *nah* kemudian dijawab sama mereka sebab kalau D3 pola pikirnya lebih terprogram. *Nah* terus kami kembalikan, kenapa dulu tahun 2010 Bapak mengambil SMK tetapi yang sekarang sudah bekerja menjadi Pimpinan perusahaan adalah tamatan SMK, rata-rata seperti itu. Seperti teman-teman kami yang dari SMK kemudian jadi direktur teknik di Lion, kemudian di Garuda, juga itu tamatan SMK sebenarnya, Pak.

Nah dengan beriring waktu mereka pasti kuliah, setelah kuliah pasti mereka bisa dapat sesuai dengan *job* posisinya Pak, *nah* itu, makanya kami juga pernah menanyakan itu kepada industri penerbangan, tetapi belum mendapatkan sesuatu hal yang memuaskan buat kami dan ini pun kami sempat berkunjung ke apa namanya itu Pak? Kadin Pak, menyampaikan aspirasi kami juga ke Kadin, namun sampai dengan saat ini juga belum ada masukan atau solusi dari pihak Kadin.

Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan kurikulum. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa, untuk SMK penerbangan yang akan berkarir di dunia penerbangan itu wajib memiliki *basic license* Bapak, *nah* sementara kami di SMK penerbangan itu anak-anak itu hanya memiliki sertifikat atau ijazah saja. *Nah* mereka memiliki sertifikat BNSP juga itu tidak-tidak terpakai Bapak ya tidak dapat digunakan di industri penerbangan, yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi yang terpakai adalah, yang digunakan adalah yang memiliki sertifikat *basic license* A1A4 dan C1C4 yang ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada CSR 4147.

Kemudian yang selanjutnya adalah kami pernah bersilaturahmi kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Kelaikan Udara, jadi kami meminta solusi kepada pihak Kementerian Perhubungan, bagaimana siswa kami supaya bisa diterima di perusahaan. Dan pada intinya sebenarnya bapak untuk perusahaan-perusahaan industri penerbangan itu masih banyak mereka yang membutuhkan anak SMK tetapi harus memiliki *basic license* tadi Pak, itu sebagai syarat wajibnya.

Nah kemudian mendapatkan arahan dari DKPPU kami akhirnya menemui beberapa lembaga yang berada di bawah *approval* daripada Kementerian Perhubungan tadi, yaitu beberapa lembaga dan ya AMTO dan disampaikannya bahwa, kalau seandainya SMK penerbangan mau diterima bekerja berarti harus mengikuti kurikulum yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan, artinya kurikulum AMTO. *Nah* ini yang yang yang nanti akan kita minta dari bantuan daripada Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat agar nanti program ini bisa berjalan Pak, supaya kami bisa mensinkronisasikan kurikulum antara miliknya Kementerian Pendidikan dengan Perhubungan.

Nah kemudian yang selanjutnya adalah kenapa kami belum menjalankan kurikulum AMTO atau industri tersebut? Karena kami belum mendapatkan persetujuan Pak ya. Artinya dari pihak Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pendidikan ini sepertinya belum ada *match* Pak seperti itu. Jadi dibutuhkan ada semacam MoU, agar kami pada saat menjalankan kurikulum ini mendapatkan semacam pengakuan Pak. Jadi jangan sampai nanti kami sudah belajar anak-anak itu 3 tahun mengikuti kurikulum industri tapi tidak diakui, *nah* ini-ini kan kasihan Pak anak-anak penyesuaian ya, artinya kita butuh penyesuaian.

Kemudian pada permasalahan sarana dan prasarana. Kalau kami memperhatikan anggota kami Pak yang 48 sekolah ini, yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, itu sebagian besar Pak hampir 75% sekolah anggota kami adalah sekolah yang swasta. Artinya mereka murni untuk pengadaan barang-barang praktik anak-anak itu, mereka mengadakan sendiri Bapak dan itu sangat mahal sekali seperti Bapak sampaikan tadi itu sangat betul Pak. Sehingga apa yang diinginkan oleh Kementerian Perhubungan sepertinya kami masih jauh panggang dari api, Bapak.

Perhubungan mintanya ada beberapa *tools* yang harus dipenuhi, tetapi kita SMK penerbangan tidak bisa memenuhi, karena dengan harga yang sangat mahal dan juga mohon maaf pemerintah sepertinya belum juga berpihak pada kami. Itu Bapak izin, sehingga sampai dengan alat komponen bekas Pak, kami sudah pernah minta barang-barang *scrap* yang miliknya GMF ya, yang miliknya Garuda, karena kami berpikir bahwa *scrap* barang-barang milik Garuda kan punya negara.

Nah kami coba meminta untuk kita bagikan kepada teman-teman sebagai pendukung alat praktik untuk anak-anak kita tapi ternyata juga belum mendapatkan hasil Bapak. Padahal itu barang itu mohon maaf Pak kalau kami melihat di gudang di belakang GMF itu, itu ada beberapa kontainer barang bekas Pak. Kenapa *nggak* dicoba dialokasikan untuk kami teman-teman semua se-Indonesia sehingga anak-anak juga bisa praktik gitu Bapak izin.

Kemudian untuk membuat *trainer set* yang seperti Bapak sampaikan tadi ini nilainya sangat luar biasa Bapak, seperti contohnya hidrolik Pak untuk *main wheel landing gear* itu juga harganya bisa hampir setengah miliar Bapak untuk satu trainer. Makanya itu sebenarnya kesulitan kami, tetapi dari Perhubungan menuntut bagaimana supaya ini SMK bisa menciptakan lulusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan.

Kemudian permasalahan guru ya, artinya di Indonesia ini Pak kami tidak ada universitas atau lembaga yang mengeluarkan lulusan sarjana pendidikan penerbangan. Ini tidak ada Pak, sehingga teman-teman kami Pak mohon maaf mengajar di SMK penerbangan itu sebenarnya saat ini Pak itu adalah orang-orang yang *basic*-nya non-non penerbangan bahkan non guru itu mereka mencoba mengajar di SMK penerbangan. Mohon maaf Pak guru tersebut memegang pesawat juga belum pernah tapi mengajar di SMK penerbangan. *Nah* ini karena kami betul-betul kesulitan guru Pak itu, dan guru yang ada pun Pak mohon maaf mereka ikut program P3K dan akhirnya mereka pergi Pak ke sekolah yang lain. Karena sudah diambil di sekolah yang baru sehingga kami akhirnya teman-teman kita juga kehilangan guru Pak dan untuk merekrut guru lagi perlu waktu lagi untuk mendidik dari nol lagi.

Nah harapan kami kalau seandainya pemerintah membuat regulasi untuk sekolah P2K, guru P3K tadi, mohon ditempatkan lagi ke tempat sekolah kami lagi, dikembalikan lagi supaya kami tidak mengulang dari nol lagi, ini harapan kami Bapak izin.

Nah kemudian Bapak, dengan adanya regulasi dan dari Perhubungan tadi ada tiga standar Pak. Tadi standarnya adalah kurikulum yang harus sama dengan kurikulum Kementerian Perhubungan, yang kedua adalah standar sarana prasarana yang tadi kita keluhkan untuk alat-alat praktik, kemudian yang terakhir adalah standar guru yang memiliki *basic license*. Karena lembaga nanti siswa kita yang akan mengikuti program AMTO adalah guru-guru yang memiliki sertifikat atau kecakapan *basic license* Pak itu. Jadi kalau di perhubungan itu diutamakan yang guru yang memiliki *basic license*, baru dia bisa ngajar di lembaga AMTO tersebut Bapak, izin.

Kemudian untuk guru-guru yang non penerbangan tadi, terkadang kami juga harus meng-*create* Pak, membuat mereka atau memberikan pelatihan kepada teman-teman kami, guru-guru SMK penerbangan itu tentang kompetensi pesawat terbang. Ya mohon maaf Pak, jadi kalau kami boleh cerita pada saat ada guru yang baru atau guru yang kira-kira belum pernah pegang pesawat, ini kalah Pak pengetahuannya dengan siswa kami yang sudah pulang atau baru pulang dari OJT. Lebih pintar muridnya Pak daripada gurunya, ini agak kebalik Pak mohon izin.

Karena pada saat kami sekolah SMK penerbangan mau mendidik guru itu biayanya sangat mahal Pak. Seperti contoh Pak, kita mengikuti pelatihan gas turbin *engine* atau piston *engine* itu satu guru bisa dibutuhkan 25 sampai 50 juta. Bahkan untuk dapatkan *license* pun kami guru-guru harus mengeluarkan uang itu sebesar minimal itu 60 juta Bapak, bahkan ada yang sampai 120 juta. *Nah* sementara Kalau kami mengadakan dana BOS kan tidak mungkin ter-*cover* dari situ semua Bapak izin.

Oleh karena itu pada tanggal 25 Februari kemarin Bapak izin, kami berusaha bertemu dengan Ibu Dirjen dan Pak Direktur SMK, menyampaikan aspirasi kami ini. Karena ini sudah sangat kebutuhan daripada industri, karena kalau tidak kita penuhi ini maka anak-anak SMK penerbangan begitu lulus ya

mereka tidak bisa diserap oleh industri karena tidak memenuhi kriteria atau *requirement* yang dibutuhkan oleh industri Bapak itu.

Nah kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya kekurangan guru bapak, kami terpaksa merekrut teknisi pesawat terbang. Jadi mereka itu kalau teknisi itu mohon izin Bapak, mereka memang betul *expert* di penerbangan tapi pedagogiknya tidak dapat Pak, anak-anak tidak dapat. Biasanya mereka hanya bisa mengajar untuk mereka sendiri, tapi pada saat mereka menyampaikan kepada anak, kadang anak tidak paham, karena tidak tahu bagaimana cara mengajar atau pedagogiknya, itu Bapak.

Kemudian yang secara umum Bapak yang selanjutnya adalah bahwa, alumni kami itu sebenarnya banyak yang akan masuk ke sekolah kedinasan tetapi kami terganjal pada saat anak-anak melakukan tes pertama atau CBT. Karena yang keluar adalah mata pelajaran untuk anak SMA, sementara yang kami didik adalah SMA, SMK dan kurikulumnya berbeda. Jadi kami kalah di saat tes pertama. Kemudian adapun satu dua anak yang mereka berhasil masuk sekolah kedinasan adalah mereka yang melakukan les di luar daripada pelajaran sekolah. *Nah* tapi mereka pada saat mereka masuk di sekolah tersebut Pak mereka menjadi *leading*, ya itu Pak izin.

Kemudian yang selanjutnya adalah kami Pak masih banyak mendapatkan kesulitan bantuan. Terutama ruang praktik Pak, ruang praktik dan alat praktik yang memang sangat harganya mahal yang tadi Bapak sampaikan.

Kemudian yang terakhir adalah Pak siswa kami pada saat melaksanakan OJT itu diperlakukan seperti karyawan, artinya mereka kerja juga 8 jam Bapak izin.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Izin Pak izin, OJT itu apa?

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

On the job training, Pak, PKL Praktik Kerja Lapangan izin iya. Jadi mereka sama Pak bekerja seperti karyawan dari waktu jam 8.00 sampai jam 4.00, kemudian mereka itu juga sama mendapatkan perlakuannya, mendapatkan Diklat ada Pak, tapi tidak setiap hari tidak hanya waktu tertentu saja. Namun pas bandara pak yang harus dikeluarkan mereka pada saat mereka OJT di bandara atau praktik itu biayanya sama Pak dengan karyawan. Sementara mereka ini kan belum bekerja, belum menghasilkan uang, tapi biaya pas bandaranya juga cukup tinggi Pak, Rp400.000 per orang, per sekali praktik Pak izin Pak, untuk sebagai pas masuknya.

Nah ini harapan kami Pak, tolong Pak dibantu dengan Ibu Menteri Keuangan mungkin ada perubahan regulasi untuk anak sekolah Pak. Siapa tau bisa lebih murah lagi untuk anak sekolah khusus Pak gitu atau untuk dunia pendidikan terutama guru. Karena kami pun guru pada saat kami mendampingi anak-anak masuk ke bandara juga harus membuat pas Pak, *nah* begitu. Padahal kami tidak setiap hari masuk ke bandara hanya pada saat monitoring dan evaluasi saja itu.

Nah kemudian yang selanjutnya adalah kami sudah berkoordinasi dengan pihak AMTO, ada beberapa AMTO yang sudah kita datangi. Jadi mereka berkenan Pak untuk mensinkronisasikan kurikulum kita antara SMK penerbangan dengan kurikulum Kementerian Perhubungan itu mereka siap Pak. Ya ada beberapa lembaga AMTO yang siap untuk mengakomodir kita, namun yang kami butuhkan adalah tadi Pak semacam ada namanya, dukungan dari pihak pemerintah kepada kami pada saat kami menjalankan kurikulum tersebut. Jangan sampai tadi Pak kami menjalankan kurikulum tapi tidak diakui, *nah* itu Pak.

Kenapa kami membuat penyesuaian kurikulum? Karena anak SMK penerbangan Pak yang lulus dari SMK penerbangan pada saat dia mau ngambil sekolah AMTO jadi teknisi pesawat itu harus mengulang dari nol lagi Pak belajarnya, kan kasihan Pak. Izin, selama 3 tahun mereka sudah disiplin latihan untuk semi militer tapi harus ngulang dari nol lagi.

Oleh karena itu, dengan adanya penyelesaian kurikulum yang seharusnya AMTO itu ditempuh pada saat mereka selesai SMK, *nah* kita akan coba tempuh selama mereka mulai dari kelas 10 Pak atau kelas 1. Selama 3 tahun nanti diakuinya berapa ribu jam kekurangannya nanti kita tempuh pada lembaga AMTO yang sudah kerja sama dengan kita, *nah* itu. Jadi kami mohon itu Pak dukungannya Pak, kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan agar ini bisa bersinergi bareng supaya nanti kita betul-betul bisa berjalan, itu izin.

Kemudian tadi Pak Kami memohon kepada Bapak Anggota yang terhormat, mohon bantuannya juga untuk menyampaikan aspirasi kami juga kepada pihak pemerintah terkait dengan guru kita yang kekurangan tadi. Kemudian permohonan bantu untuk akannya diklat kompetensi guru agar guru-guru kami mendapatkan *basic license*. Kemudian untuk prasarana, kami mohon bantuannya Pak mungkin bisa ditembuskan ke GMF barang-barang yang tadi sudah *scrap* itu bisa kita dapatkan untuk kita bagikan kepada teman-teman kita seluruh Indonesia, izin Bapak.

Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir Pak, yaitu usulan mendapatkan program studi keahlian manajemen transportasi berupa *ground handling*, kemudian *aviation security* dan *cargo handling*, ini yang belum ada Bapak izin tapi itu dibutuhkan oleh industri, izin Bapak. *Nah* sementara kalau industri penerbangan mau menggunakan anak-anak SMK penerbangan Pak, mereka harus melatih lagi kurang lebih selama 3 sampai dengan 6 bulan dan itu membutuhkan biaya yang besar Pak. Jadi anak-anak kami itu mohon maaf SMK itu kalau kami bisa di SMK penerbangan itu pengkhususannya Pak

namanya sekolah menengah ke bawah Pak bukan kejuruan, ke bawahnya adalah ekonominya ya, *nah* iya.

Kemudian yang selanjutnya adalah untuk SMK penerbangan kesulitan Pak mendapatkan Sekolah Pusat Keunggulan. Ya dikarenakan tadi Pak karena serapan kami dan kami juga sudah berkali-kali mendatangi Pak Dirjen dan Pak Direktur SMK dan dijanjikannya untuk tahun 2023 kami mendapatkan sekolah PK Pak, tapi ternyata sampai dengan detik ini juga belum, izin. *Nah* sehingga mohon izin, kami yang minoritas ini seperti benar-benar anak tiri izin Pak. Padahal kami jujur kami menciptakan atau menghasilkan lulusan yang akan menjaga udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi jangan sampai ada diskriminasi bagi kami semua di SMK Penerbangan Bapak, mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan, sementara nanti tinggal teman-teman atau Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat bisa bertanya lebih detail lagi pada kami

Demikian, saya akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Cukup, Pak? Baik.

Menarik juga ya, cerita ini menarik. Saya membayangkan ada lagi nanti namanya SMK Kelautan.

KETUA FORUM KOMITE SMA BANYUWANGI (MISNADI):

Sama, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Mungkin sama kali ya.

KETUA FORUM KOMITE SMA BANYUWANGI (MISNADI):

Sama Pak, nasibnya sama kami Pak, sama Pak.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Ini akan jadi catatan penting bagi kita nanti untuk kita diskusikan dengan pemerintah.

Terima kasih Pak masuk-masukannya sangat berharga sekali, ini membuka mata kita ya. Kalau tadi saya sekilas saya coba browsing memang industri penerbangan ini harus menaikkan *grade*-nya sejak 2016 mungkin. Dikarenakan banyaknya permasalahan pesawat pada saat itu sehingga akhirnya harus mengambil D1 ke atas ya.

Sebenarnya ini *nggak* ada masalah jika ada komitmen antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Perhubungan, ini kan karena ada kurikulum yang *nggak* masuk dan sebagainya. Ini nanti kita akan sampaikan ya tapi ini hanya baru awal saja dan juga tentu bisa memberikan tanggapan.

Selanjutnya kita dengar dulu dari komite Banyuwangi, *monggo*, silakan Pak.

KETUA FORUM KOMITE SMA BANYUWANGI (MISNADI):

Makasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quata illaah amma baa'du,*

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota,

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, saya mewakili dari Forum Komite SMA-SMK se-Kabupaten Banyuwangi. Di sini ada SMA jumlahnya 15 atau 16, kemudian SMK-nya itu ada 9 termasuk ada SMK Pelayaran, nasibnya sama dengan penerbangan, nanti dijelaskan oleh komite saya.

Kemudian Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan terutama mengawali pertemuan ini tentang masalah profil pendiri, berdirinya forum komite sekolah di di Banyuwangi.

Jadi yang melatarbelakangi berdirinya SM, forum komite tersebut karena di Banyuwangi ini komitenya itu punya latar belakang yang tidak sama. Ada pengacara, ada berapa *lawyer*, kemudian ada wartawan, ada LSM, ada kiai, ada ustad, ada preman syariah ada. Jadi dengan tidak samanya latar belakang ini membentuk Forum Komunikasi SMA-SMK se-Kabupaten Banyuwangi, kita dirikan 4 tahun yang lalu.

Kemudian.

Bapak, Ibu sekalian,

Karena tugas komite itu adalah peran komite dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah, jadi betul-betul di Banyuwangi kita laksanakan sehingga di Banyuwangi itu banyak sekolah-sekolah di kabupaten lain studi banding tentang peran komite di Banyuwangi.

Kemudian saya pada tanggal tahun 2022, itu saya diundang di DIY menjadi narasumber tentang peningkatan mutu pendidikan sekolah dan sekaligus di DIY itu ada pembentukan Forum Komite Kabupaten Dan Provinsi, itu latar belakangnya, sehingga peran komite di Banyuwangi itu sangat penting sekali terutama sekolah. Karena apa Bapak sekalian, dengan dibentuknya forum komite itu kenapa dibentuk? Karena kita ini sering di-*bully* Pak oleh pihak ketiga.

Jadi disomasi, dikasih surat cinta, dilaporkan ke polisi tentang pungli, sehingga dengan adanya forum komite ini kita siap menghadapi. Karena payung hukumnya ada, oleh karena itu dengan berdirinya forum komite ini sehingga kita ini betul-betul melindungi kepala sekolah. Karena kepala sekolah tidak boleh ngomong duit, tidak boleh ngomong PSM.

Partisipasi masyarakat itu yang punya kewenangan berdasarkan Permendikbud 75 itu adalah komite sekolah. Maka apabila kepala sekolah ngomong masalah duit itu pungli, tapi pada saat komite sekolah itu dasar hukumnya ada, sehingga Bapak sekalian perlu kami sampaikan bahwa komite Banyuwangi itu sudah dilaporkan Polda Jatim sudah. Ini saya dilaporkan di pores Pak tentang pungli, saya tunggu Pak, teman saya dari genteng sudah diperiksa dua kali tentang pungli PSM. Kita siap menghadapi karena payung hukumnya ada, jadi itu latar belakang berdirinya Forum Komite Sekolah.

Oleh karena itu di Banyuwangi Pak kepala sekolah itu sudah ndak mau ngomong, yang penting dana PSM kita yang cari, sekolah yang menggunakan sesuai dengan anggaran. Jadi sekolah ini sebenarnya sudah gratis Pak, karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di-*cover* oleh dana BOS kalau di Banyuwangi, di Jawa Timur ada BUPP. Jadi dari provinsi yang tidak bisa di-*cover* dengan itu maka ditopang oleh dana partisipasi masyarakat, jadi itu peran komite.

Kemudian pemaparan sudah sampaikan, maka saya sebagai Ketua hanya menyampaikan secara kilas nanti akan disampaikan oleh anggota-anggota saya. Mungkin itu Pak saya sampaikan, terima kasih saya sampaikan, saya lanjutkan kepada Pak Haji Nanang.

SEKRETARIS FORUM KOMITE SMA BANYUWANGI (NANANG NUR AHMADI):

Izin, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebelumnya yang kami hormati Pimpinan Mas Dedi Yusuf, beliau adalah aktor film yang saya suka waktu itu, hari ini tetap suka Pak, tepuk tangan buat beliau Pak beserta jajaran. Kami datang dari ujung Pulau Jawa Kabupaten Banyuwangi sangat jauh sekali. Kami datang naik bus mulai jam 7 pagi kemarin Pak, ya kemarin pagi Pak, lewat tol Pak nyewa bis baru nyampai subuh tadi di Karawang Bekasi terus sahur sholat subuh. Artinya apa, perjalanan panjang

yang sangat melelahkan ini, kami lakukan semata-mata untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Kami datang dari Banyuwangi untuk Indonesia, itu jargon kami yang pertama. Yang nomor dua, kami berterima kasih diberikan ruang yang bagus di tempat yang mulia ini. Ini suatu kehormatan bagi kami orang daerah yang peduli pendidikan di wilayah kami, mudah-mudahan hasilnya nanti bermanfaat untuk Indonesia.

Perlu kami tegaskan Mas, Mas Dede selaku Pimpinan, tadi sama Ketua sudah sampaikan bahwa forum ini terbentuk dari beberapa Ketua-Ketua komite SMA-SMK Negeri se-Banyuwangi. Kami mempunyai wadah yang namanya forum sesuai akta notaris SK Menkumham nomor AHU935 AH02.01 tahun 2013 tanggal 14 November 2013, notaris Sedah Ayu M.A.MP.SH.MKN. Ini nanti akan kami serahkan kepada Pimpinan, untuk sebagai dasar kami melangkah lebih jauh, yang jelas kami tidak ilegal, kami legal. Karena selama ini yang terjadi di masyarakat kami selalu di-*bully* bahwa dana peran serta masyarakat dikatakan pungli dan lain sebagainya. Maka dari itu kami nanti mohon *panjenengan* bisa menerima ini sebagai dasar *panjenengan* dan ini suatu hal yang membanggakan buat kami.

Kemudian yang kedua, seperti yang ada di-*slide* itu bahwasanya ada berapa yang sedang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi khususnya dan mungkin seluruh Indonesia. Kemudian permasalahan-permasalahan yang *crucial* di antaranya, nanti mohon ditindaklanjuti sama teman juga tentang penerimaan peserta didik baru, biaya pendidikan yang mahal mungkin ada kesinambungan dengan teman dari penerbangan. Terus kemudian ada peran serta masyarakat, peran pemerintah daerah, peran forum komite sekolah.

Tentang penerimaan peserta didik baru, ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, satu tentang kuota zonasi karena di sini zonasi menjadi pro dan kontra, ada yang enak dan ada yang tidak. Kemudian revitalisasi sekolah negeri dan swasta menghapus kesan sekolah favorit dan memberdayakan sekolah yang swasta. Kemudian yang ketiga buka jalur mandiri untuk menampung siswa yang tidak terima lewat jalur afirmasi, zonasi dan prestasi untuk menghindari siswa masuk tanpa jalur yang jelas. Empat, penambahan rombongan belajar atau rombel pada sekolah tertentu, contoh SMA 1 Genteng, nanti ada Pak komitenya biar dijelaskan dan ada Sekolah Taruna Bayangkara di sana.

Kemudian yang kedua biaya pendidikan mahal, satu optimalisasi penggunaan dana BOS agar lebih presisi dan kami mohon dengan hormat Pimpinan dana BOS nanti jangan dihapus. Kalau perlu ditingkatkan karena ada indikasi isu yang dibangun oleh orang-orang tertentu, katanya dana BOS mau dihapus, kami sangat keberatan Pak. Nomor dua, pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan fisik sekolah, bukan masyarakat. Ketiga, dana peran serta masyarakat sifatnya menopang atau membantu kekurangan anggaran dari pemerintah. Empat, minimalisasi kebutuhan personal siswa.

Kemudian yang selanjutnya masihkah, masih perlukah dana PSM atau pert, peran serta masyarakat digunakan? Ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Satu, sesuai Undang-Undang Sisdiknas PP 48 2008 PW 17 2010 Permendikbud 75 2016 bahwa, pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan swasta, maka bantuan masyarakat sifatnya sumbangan dan masih diperlukan. Kedua, syarat dan ketentuan tentang sumbangan berlaku dan sumbangan sifatnya menopang pendanaan yang bersumber dari pemerintah.

Ketiga, sesuai ketentuan di atas, maka tidak boleh ada istilah pendidikan gratis tetapi pendidikan bersubsidi silang. Empat, kenyataan yang terjadi kepala daerah mungkin gubernur, bupati, walikota sering melontarkan istilah pendidikan gratis, apalagi dekat dengan momen Pilkada ini yang sering terjadi Pak. Ini yang menjadi apa ya benturan kami yang di bawah karena sesuai yang disampaikan pejabat politik seperti itu, tapi di sini sisi lain ada Permendikbud yang membolehkan, ini yang nanti akan kita kupas tuntas hari ini Pak.

Kemudian yang keempat, yang kelima terjadi konflik *interest* di tingkat sekolah dan masyarakat. Tidak jarang komite sekolah dilaporkan ke Polres, aparat penegak hukum dan ini terjadi di Banyuwangi Pak dan mungkin kalau lihat di Youtube-YouTube bahkan di Jawa Tengah banyak yang sudah terjadi di kepala sekolah dipecat Pak dan lain sebagainya. Ini adalah dampak daripada *statement-statement* pimpinan kita yang ada mementingkan kepentingan politik.

Kemudian selanjutnya adalah peran pemerintah daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya bergesernya pengelolaan SMA, SMK, SLB ke Pemprov Jatim, kalau di Banyuwangi ini Pemprov Jatim Pak, maka Pemkab atau Pemkot sudah tidak ikut bertanggung jawab atas tiga lembaga tersebut. Sehingga tidak ada proses pembinaan dan penganggaran, ini untuk daerah tingkat dua, Pak. Selama ini seperti itu, padahal yang sekolah ini anak-anak tingkat dua dan lokasinya ada di tingkat dua, ini mohon nanti untuk di-*follow up*, Pak.

Kemudian dua, Pemkab atau Pemkot DPRD membuat regulasi dan mengalokasikan anggaran pusda, maka biaya pendidikan bisa lebih ringan atau murah bagi masyarakat. Artinya dengan BOS pusat termasuk BPIP di topang BOSDa daerah ini sangat meringankan Pak untuk kepentingan anak-anak yang ada di daerah. Tiga, Pemkab Pemkot membantu menyalurkan lulusan SMA SMK di dunia kerja dan industri di daerah.

Kemudian peran Forum Komite Sekolah, Bapak. Dibentuk dengan alasan dan maksud, satu perbedaan latar belakang para Ketua Komite, seperti tadi sampaikan Ketua ada *lawyer*, ada preman syariah. Ini saya termasuk preman Pak tapi yang syariah, termasuk saudara saya ini Pak Subur dari Pesanggrahan ini. *Nah* kemudian karena mungkin disparitas sekolah SDM letak geografis yang jumlah siswanya kebutuhan, kebutuhan dan lain sebagainya.

Ketiga, tidak adanya komunikasi antar komite sekolah yang satu dengan yang lain padahal masalah yang timbul hampir sama, ini salah satu faktor kenapa forum dibentuk. Yang empat, memudahkan komunikasi konsolidasi dan *problem solving*. Lima, mediator antara pemerintah provinsi kabupaten/kota, sekolah dan masyarakat. Enam, mengawal kebijakan pemerintah utamanya di bidang pendidikan.

Problem yang muncul, satu, forum komite tidak punya hubungan struktur dengan instansi pendidikan sehingga sering disamakan dengan LSM dan dianggap mengganggu kepentingan pihak tertentu. Sehubungan sifatnya forum komunikasi dan visi misinya tegas mengawal pendidikan agar bermutu serta supaya lebih jelas status makanya, lebih jelas statusnya, maka pengurus, mengurus legalitas ke Kemenkum HAM. Ini kemudian oleh pihak cabang Dinas Pendidikan wilayah kabupaten dianggap sama dengan LSM, ini bicara lokal Pak, Banyuwangi.

Dua, para Ketua Komite sekolah, para Ketua Komite sekolah yang menurut Permendikbud Nomor 75 2016 ditetapkan oleh kepala sekolah menghimpun diri dalam wadah forum komite ini, agar mendapat kekuatan dari tekanan kepala sekolah manakala terjadi perbedaan pandangan.

Kemudian tawaran solusi dan harapan kepada Komisi X DPR RI:

1. Memohon kepada Komisi X untuk untuk mengingatkan gubernur, sekali lagi gubernur termasuk walikota, bupati, agar tidak melontarkan istilah "gratis" saat kampanye karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas PP 48 2008, PP 17 2010 dan Permendikbud nomor 75 2016 Pasal 10 ayat (2), nanti dibuka Pak bersama-sama kemudian.
2. Memohon dengan hormat kepada Komisi X DPR RI agar Mendikbudristek meninjau ulang permendikbud 75 2016, khususnya penetapan pengurus komite oleh Kepala Sekolah Pasal 6 ayat (3). Ini sering dijadikan alat oleh kepala sekolah untuk menghardik Ketua Komite manakala terjadi ketidakcocokan. Solusinya, kami mohon kiranya menteri mengubah pasal dan ayat tersebut bahwa yang menetapkan pengurus komite sekolah adalah gubernur atau kepala dinas pendidikan provinsi atau kepala cabang Dinas Pendidikan wilayah kabupaten/kota se-Indonesia, dengan catatan komite sekolah bukan bawahan kepala sekolah.

Karena yang terjadi saat ini Pak Pimpinan, SK kita dari kepala sekolah, ini sangat ironis sekali, Pak. Kemudian.

3. Setiap tahun pada saat PPDB sering terjadi gejolak masyarakat, baik dalam proses PPDB maupun pemenuhan personal, contoh kain seragam, buku, keperluan praktik industri dan lain sebagainya. Sesuai Permendikbud 75 2016 dan menurut hemat forum komite hal tersebut menjadi hak orang tua peserta didik, tidak perlu ada

pengkondisian pengadaan barang-barang tersebut oleh pihak-pihak tertentu atau memonopoli.

4. Di Banyuwangi butuh pemimpin yang komprehensif, ini bicara di Kabupaten kami, Pak. Loyal kepada bangsa dan negara, melayani masyarakat dengan baik, bermitra dengan lintas sektor termasuk teman-teman LSM, teman-teman media atau wartawan dan Forum Komite Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini kami pengurus merasa tidak dapat membangun komunikasi yang baik dengan kepala cabang dinas, maka kami mohon agar pejabat yang berwenang dapat melakukan evaluasi atas kinerja dan komunikasi kepala cabang dinas Kabupaten Banyuwangi agar di Banyuwangi pendidikan baik-baik saja.

Saya kira itu Pak Ketua, Pak Pimpinan, terima kasih atas sambutan yang baik ini dan nanti teman-teman akan mengimplementasikan apa yang sudah kami paparkan. Demikian yang mungkin kami bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Sampun, Pak? Sudah dari forum? Ada yang mau ditambahkan silakan?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (SUPRIYADI):

Saya dulu nggih.

Terima kasih, Pimpinan.

Yang disebut tadi terkait polemiknya Ketua Komite ditunjuk oleh Kepala Sekolah, proses rekrutmennya sebetulnya sudah benar. Saya melihat di khususnya di Kabupaten Banyuwangi bahwa, Anggota komite itu terdiri dari tiga unsur praktisi pendidikan tapi bukan guru ataupun kepala sekolah. Yang kedua adalah tokoh masyarakat, sisanya yang 50% wajib dari perwakilan wali murid.

Persoalannya adalah salah satu tugas dan fungsinya komite itu adalah mengawasi kinerja satuan pendidikan, lah yang memberikan SK adalah kepala sekolah. Ini problem yang-yang harus segera dipecahkan saya kira. Saya melihat struktur sekolah itu di tingkat SLTA, itu ada empat wakil kepala sekolah yaitu di bidang sarana prasarana, terus kemudian kurikulum, kemudian yang satunya kesiswaan, yang satunya humas. Beliau berempat itu SK-nya adalah kepala cabang dinas, Kepala UPTD-nya di bawah provinsi. Sedangkan kami yang biasanya bekerja dan bermitra dengan empat waka itu dalam urusan-urusan tentang bagaimana mengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan, beliau SK-nya lebih tinggi dari kami. Padahal tugas kami salah satunya

mengevaluasi kinerjanya kepala sekolah, sangat mustahil kalau ini tidak segera dirubah.

Kemudian ada satu yang juga tidak dijalankan oleh pemerintah yakni perintahnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita bahwa, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah itu diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pada kenyataannya, keberadaan kami diatur oleh Peraturan Menteri. Dampaknya apa kalau hanya sebagai diberi SK oleh kepala sekolah? Peran komite tidak bisa masuk terkait dengan penggunaan dana BOS dan BPOPP, Pimpinan.

Padahal kami perwakilan wali murid, perwakilan masyarakat, praktisi pendidikan, ingin masuk kedalamnya bukan ikut *cawe-cawe* dalam hal apa dalam hal pengelolaannya, tapi kami ingin memastikan satuan pendidikan itu kekuatan anggaran pemerintah itu sampai di mana sih? Sehingga ketika kita setiap tahun pleno dengan wali murid sangat tergambar jelas, ini loh yang dibiayai BOS, ini loh yang dibiayai BPOPP. Kami baru mengkomunikasikan kekurangannya seperti teman-teman penerbangan maupun kelautannya ini, kekurangannya di sini loh, sehingga kami bisa berkomitmen dengan wali murid dalam pleno ini besaran yang disumbang kepada sekolah berapa.

Namun kenyataan yang terjadi selama ini, saya yakin ini terjadi di seluruh Indonesia. Pak kepala sekolah memaparkan bersama waka-wakanya disampaikan kepada wali murid dalam rapat khusus seperti ini, keesokannya kepala sekolah mengundang wali murid, kita berhadapan dengan wali murid. Diisinya di dalam lebih cenderung kita curhat, sekolah kita ini sudah begini, sudah maju, sudah bagus, tapi ininya kurang, ininya kurang, ininya kurang.

Saya kebetulan Ketua Komite sekolah yang paling favorit di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di SMA 1 Genteng. Kenyataan dalam leg, legenda sekolah yang kami baca, kami ini dalam kurun waktu mulai tahun 78 sampai 2024 ini hanya baru satu kali saja Pak menerima DAK, Dana Alokasi Khusus, kalau yang lain-lain saya kira perlakuannya sama. Kenapa, ternyata pada saat itu tanah kami konflik, sehingga yakin keseluruhan infrastruktur yang sekolah termaju di Banyuwangi yang kami miliki ini, itu dana partisipasi dari masyarakat.

Namun kenyataannya sering kali disampaikan oleh ibu gubernur yang tempo hari memimpin itu begitu ada PPDB, kita semua kepala sekolah sama Ketua Komite disuruh diminta untuk membuat komitmen tidak boleh ada iuran, tarikan, dan lain sebagainya. Fakta integritas itu harus kami buat, kenyataannya kalau hanya BOS dan BPOPP *nggak* jalan sekolah kami, Pak. Mobilisasi sekolah kami memang yang teman-temannya itu ada hanya 5 5 hari di di kami justru 6 hari itu penuh. Di sana ada Olimpiade kelompok-kelompok mata pembelajaran itu anak-anak itu pulang-pulang sampai malam-malam gitu, sehingga karena mobilisasi anak-anak dana BOS dan BPOP tidak mencukupi.

Yang lebih penting lagi tadi dipaparkan juga sekolah di wilayah kami itu tadinya ada sekolah SMA oke, terus kemudian didalamnya sekarang diubah menjadi Sekolah Taruna Bayangkara. Ini nanti akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan *blank school* antara peminat yang masuk ke sekolah kami

dengan rombongan yang kami sediakan sangat sedikit, sehingga sekolah kami dijadikan ajang teror setiap tahun dan trauma itu bagi kepala sekolah dan Ketua Komite.

Untuk berikutnya terkait dengan *blank school* mohon disampaikan oleh teman kami walaupun waktunya agak sedikit terbatas.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Terima kasih, Pak Supri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu Bagas waras,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi X beserta seluruh Anggota,
Kawan-kawan dari Forum SMK Penerbangan kemudian,
Kawan-kawan dari Forum Komite Sekolah se-Kabupaten Banyuwangi,**

Tadi sebagian sudah disampaikan oleh kawan saya dari SMA 1 Genteng, Pimpinan. Nama saya Yudianto, kebetulan Ketua Komite Sekolah SMA Negeri Glenmore.

Bahwa hari ini di Banyuwangi ada liberalisasi atau kapitalisasi pendidikan. Kenapa saya sampaikan seperti ini, ada satu lembaga yang berdiri kemudian ini tidak terbeli oleh masyarakat karena persoalan biaya. Diversifikasi atau ahli fungsi dari SMA Negeri 2 Genteng, dulu di SMA di Genteng ada dua SMA Pak Ketua, Pimpinan, SMA Negeri 1 Genteng kemudian SMA 2 Genteng. Hari ini SMA 2 Genteng menjadi SMA Taruna Bayangkara.

Dalam satu lingkungan dengan SMA Taruna Bayangkara, di situ ada SMP 4 Genteng sehingga *input* mereka atau kelulusan dari SMA, SMP Negeri 4 Genteng, tidak mungkin akan bisa diterima di SMA Taruna Bayangkara. Karena mahalnya pendidikan dan kapitalisasi itu terjadi karena rata-rata hampir yang masuk di SMA Taruna Bayangkara mereka dari luar Bapak, anaknya para Bos *nggih*, anaknya para petinggi di institusi tertentu *nggih* atau dari mana. Ini kemudian yang menjadikan efek daripada penerimaan peserta didik baru dalam setiap tahun.

Di sekolah kami, di SMA Negeri Genteng, SMA Negeri 1 Glenmore, kemudian di SMA Negeri 1 Genteng, ini menjadi destinasi Bapak. Kami ini dikeroyok dengan ancaman dari berbagai sektor. Kami dipaksa untuk menerima mereka yang tidak ter-cover lewat jalur zonasi karena hari ini 50% sistem PPDB itu adalah jalur zonasi, tidak semua ter-cover di sekolah favorit.

Kami menjadi bulan-bulanan, dipaksa, ada yang mengatasnamakan Anggota DPR, kemudian titipan dari institusi tertentu dan kami tidak mungkin Bapak untuk menaikkan pagu penerimaan, karena jumlah kelas kita terbatas. Kalau kita terima yang pasti kami akan kekurangan kelas.

Ironis sekali Bapak sekalian bahwa, kita wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat, tapi kondisi ini terbalik. Untuk itu kami berharap, kami dengan Komisi X dapat membangun sinkronisasi. Artinya ketika diversifikasi dari SMA 2 Genteng menjadi SMA Taruna, ini menimbulkan *blank school* area Bapak di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang terdekat dengan SMA Taruna Bhayangkara. Kami mohon paling tidak *panjenengan* bisa menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan untuk mendirikan unit sekolah baru.

Nuhun sewu ini Bapak, ini menjadi tangisan masyarakat ketika anak-anak mereka tidak bisa *ter-cover* di sekolah kami, akibat daripada ahli fungsi SMA 2 Genteng menjadi SMA Taruna Bhayangkara. Ini rancu sekali, setiap tahun, 4 tahun ini menjadi hal yang klasik Bapak. Kami berdua ini selalu jadi bulan-bulanan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Maaf saya mau apa *emphasize* sedikit. SMA 2 berubah menjadi SMA Taruna Bhayangkara, ini ada polisi, kok bisa berubah dari negeri ke Bayangkara gimana?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Kebetulan ketika penyelenggaraan pendidikan di level SMA dan SMK ini kan menjadi tanggung jawab provinsi, Bapak. Ini sesuatu yang *prestige* bagi masyarakat Banyuwangi di awal. Mereka mungkin mengira akan mudah masuk untuk menjadi Taruna di SMA Negeri 2 Genteng yang sekarang menjadi SMA Taruna Bhayangkara. Ternyata dengan biaya yang tinggi, kemudian jumlah pagu penerimaan yang sangat sedikit. Teman-temana apa, lokal itu *nggak* mampu teman apa anak-anak lokal itu tidak mampu membeli Bapak dengan biaya yang besar, belum lagi dengan seleksi penerimaan yang tidak sama dengan proses PPDB di sekolah pada umumnya.

Ini *nuhun sewu* dan saya ada yang lupa Bapak ini penting, saya minta panjenengan karena ini menjadi masalah, mohon Komisi X untuk sidak Bapak di Kabupaten Banyuwangi atau di provinsi Jawa Timur karena keberadaan SMA dan SMK itu ada di kendali provinsi sekarang, Pimpinan.

Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Merdeka!

f

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (SUPRIYADI):

Mohon izin Pimpinan nambahi.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Silakan, Pak.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (SUPRIYADI):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Bermula dari kami forum komite kirim surat kepada Komisi X, itu dilatar belakangi dengan banyaknya masalah. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh beberapa rekan-rekan yang terdahulu. Ini permasalahan yang paling *crucial* yaitu tentang dana BSN yang selalu dilirik oleh beberapa teman-teman LSM, wartawan maupun wali murid yang sok menjadi LSM dan wartawan, sehingga korbannya adalah sekolah, kepala sekolah, berikut komite, ini yang selalu dilaporkan kepada PH. *Nah* ini yang perlu di diselesaikan harapan saya, kalau memang diharapkan bahwa sekolah ini gratis, mohon dikaji ulang kembali permendiikbud 75 tahun 2016.

Terus selanjutnya bahwa, biaya modal, biaya yang mahal ini tadi dilatar belakangi dengan adanya seragam yang dimonopoli oleh tengkulak, yang memanfaatkan kacap di wilayahnya masing-masing khususnya yang dimotori oleh provinsi Jawa Timur. Ini jangan sampai ada, karena bagaimanapun di kabupaten ini sudah ada juga yang namanya toko-toko kain yang luar biasa. Sedangkan seragam yang di drop dari provinsi itu bahannya tidak layak, banyak wali murid banyak yang dikembalikan seragam ini. Banyak wali murid banyak siswa yang mengeluh juga dengan harga yang luar biasa mahal.

Yang ketiga, banyaknya masalah antara kepala sekolah beserta komite ini dilatarbelakangi oleh kacapdin yang tidak beres kinerjanya saat ini. Kami mohon bantuan Komisi X ini untuk bisa mengevaluasi keberadaan kacapdin Banyuwangi yang sering bisnis kain juga mengarahkan, termasuk turba ke sekolah-sekolah ini minta jatah. Ini yang fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga komite-komite yang seolah-olah termasuk yang disebut oleh rekan-rekan bahwa komitenya adalah preman syariah dan lain sebagainya ini tadi melarang. Karena yang diminta itu dana dari BSN, BOS *nggak* mungkin akan bisa dianggarkan.

Terus yang selanjutnya, ketika dana PSM itu sudah terkumpul itu pun tidak masuk 100% setiap tahunnya. Untuk apa sih dana PSM? Salah satunya untuk menopang kebutuhan operasional yang ada di sekolah termasuk ngecet

bangunan, merenovasi kamar mandi dan yang lebih strategis lagi adalah menambah intensif guru GTT dan PTT ini setiap bulannya, sehingga ketika kita menarik iuran yang sudah di dikasih amanat oleh Permen tadi bahwa komite beserta wali murid diperbolehkan menggalang dana. Bahasanya seperti itu, tapi kalau laporan bisa pungli, bisa tarikan, bisa iuran, dan lain sebagainya.

Ini kita harus pandai-pandai, kalau kita tidak baik-baik dengan LSM, tidak bersaudara dengan wartawan pasti di setiap bulan sekolah kita di-*bully* sampai dilaporkan. Dan ujung-ujungnya Bapak Pimpinan, ketika ini diselesaikan dengan di meja kekeluargaan pelapor ini adalah minta sesuatu yang sangat luar biasa dan itu juga dana dari PSM, ini yang perlu di, perlu dibahas. *Nah* sehingga sesuai dengan SK tadi yang sudah disebutkan permohonan rekan-rekan itu perlu dievaluasi termasuk keberadaan kacapdin saya.

Terima kasih dari saya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik, baik terima kasih.

Sudah kita tangkap permasalahan, ya memang ini bukan hanya di Banyuwangi, di mungkin dapil kita masing-masing juga, di Jawa Barat juga saya sering menerima masalah kayak begini. Kebetulan istri saya dulu pernah jadi Ketua Komite juga, jadi paham bagaimana mencari tambahan dana. Kayaknya memang harus kita dudukkan ini Permendikbudnya ya, lalu kemudian bagaimana posisi fungsinya harus kita dudukkan kepada pemerintah.

Saya tertarik dengan tadi, kalau bisa calon-calon kepala daerah jangan bilang gratis lagi gitu ya. Saya ini salah satu pelaku dulu yang mengkampanyekan gratis, tapi itu dulu karena waktu itu kan belum ditarik SMA, belum ditarik ke provinsi, sehingga kita hanya memberikan bantuan. Sekarang ini memang kalimat gratis ini memang perlu kita perhatikan ketika dana BOS tidak cukup meng-cover untuk SMA ya.

Barusan saya tadi *browsing* juga SMA Negeri 2 Taruna Nusantara, eh *sorry* Taruna Bhayangkara itu BOP-nya 5 juta ya sebulan, kurang lebih ya. Iya jadi memang tentu buat masyarakat sekitar lokal berat gitu ya. Baik ini kayanya yang mau bicara orang Dapil Jawa Timur nih siapa nih? Mas Aam ya, Mas Aam dulu nih.

Silakan *monggo* nanti SMK, silakan yang lain juga.

F-P.NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, SP.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Terima kasih, Pimpinan, Kang Dede.

Kang Dede ini memang salah satu Pimpinan yang sangat piawai dalam memimpin sidang dan sangat bijak dalam menerima semua masukan yang ada di lapisan masyarakat, inilah kehebatan Kang Dede.

**Sahabat-sahabat semua dari dua rombongan,
Dari penerbangan dan Forum Komunikasi Komite,**

Saya selama 6 tahun menjadi Ketua Komite sekolah anak saya, anak saya tiga sekolah di tempat sekolah yang sama. Jadi mulai dari anak saya yang pertama saya anak saya yang ketiga jadi saya Ketua Komite, saya berhenti menjadi Ketua Komite gara-gara pindah rumah, Pak. Karena pindah rumah akhirnya anak saya pindah sekolah juga. Ini sebuah apa sangat bersentuhan dan sangat kami rasakan di yang terjadi di lapangan bahwa kami yang di Komisi X ini, kerjanya memang tiap hari ketemu antara satu sekolah dengan yang lain, ketemu dengan kepala sekolah dan ketemu dengan komite sekolah, karena yang itulah program unggulan kami di Komisi X ini.

Yang pertama yang kaitannya dengan SMK penerbangan, sang termasuk anak saya sangat mengidolakan dan sangat kepingin masuk di SMK penerbangan, ternyata yang terjadi adalah seperti ini ya, jadi agak-agak mundur juga saya ke SMK penerbangan. Karena bayangan kita kan setelah masuk SMA penerbangan nanti setelah masuk situ lulusnya kan sudah sangat mudah sekali dan bayangannya nanti menjadi pilot, kan gitu.

Ada hal yang menarik menurut saya, yang pertama adalah di di sini adalah tentang persoalan, bagaimana SMK menerbangkan ini adalah menurut saya ini sebenarnya apa yang menjadi persoalan sini. Problem di sini ini sudah dijawab sendiri oleh *panjenengan* semua, yaitu mulai dari permasalahan pada industri penerbangan, permasalahan kurikulum, permasalahan sarana prasarana, sampai pada solusinya yaitu tentang bagaimana alumni SMK penerbangan tetap mendapat harapannya, ini kan sebenarnya sudah ada.

Hal yang terpenting adalah menurut saya yang pertama, bagaimana ini bisa adaptif. Teman-teman pengelola SMK penerbangan yang ada sebanyak 48 apa 46 sih ini? 48 ya, tapi kalau saya hitung yang ada di peta ini disebarannya ada 46, Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):**

Ya izin Bapak, mulai tahun 2024 ini, rekan kami dari 48 yang baru lapor ke kami untuk mengundurkan diri karena program studinya tutup dan sekolahnya tutup itu ada 5, izin Bapak.

F-P.NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, SP.):

Karena yang kami, saya lihat di sejarah sebaran eranya itu ada 46 gitu, tapi tadi laporan kan 48 tapi *nggak* ada masalah itu. Kalau misalnya yang pertama adalah Kang Dede ya, sebenarnya solusinya sudah jelas sudah ada sendiri-sendiri, tinggal yang penekanannya menurut saya bagaimana kepala-kepala sekolah dengan komite sekolahnya juga bisa lebih adaptif tentang kondisi kekinian. Karena apa, kalau misalnya saya bayangin ya, dulu kalau orang mau jadi wartawan Ini kan ada sekolah jurnalis sendiri.

Sekolah jurnalis tentang kewartawanan, tapi saat ini kan sudah tidak seperti itu lagi, wartawan ekonomi ya diambil dari orang-orang yang punya kompetensi ilmu keekonomian. Wartawan hukum ya diambil dari kompetensi hukum, tidak lagi spesifik seperti dulu yaitu yang harus betul-betul keluar dari jurnalistik, ya kan seperti itu. *Nah* saya kira ini juga sama dengan SMK penerbangan seperti itu makanya kalau menurut saya ini harus betul-betul adaptif.

Yang kedua tentang profesionalisme guru, saya kira memang tadi sudah disebut oleh Pimpinan kami. Kami memang harus menjadi skala prioritas Kang Dede ya, bagaimana bisa ada sinkronisasi tentang antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Perhubungan. Dua, dua Kementerian ini tidak ada titik temu, saya kira apa yang menjadi cita-cita kita di sini kayaknya ini hanya menjadi mimpi kosong.

Oleh karenanya memang catatan rekomendasi di RDP saat ini, saya kira suatu saat nanti mungkin setelah lebaran atau kapan kita harus ketemu lagi dan kita harus memanggil dua Kementerian itu, atau juga bisa kita tambahkan dengan Bappenas sebagai regulasi penyelenggara tentang bagaimana tata kelola pendidikan kita kedepannya, saya kira seperti itu.

Yang ketiga tentang profesional guru, yang ketiga adalah bagaimana komitmen dan kolaborasi, yang ketiga adalah profesionalisme guru, ini kaitannya juga dengan tadi. Ini memang menjadi sebuah hal yang sangat paradoks ya. Satu sisi guru-guru honor itu kepingin ada peningkatan ekonomi, jadi makanya ikut P3K, tapi ketika dia ikut P3K karena ada regulasi dia harus pindah ke sekolah negeri, *nah* akhirnya kan harus meninggalkan sekolah itu.

Saya seringkali di forum ini membicarakan bahwa ada dua organisasi besar yang ini menjadi sangat apa ya, sedih dengan program P3K, yaitu adanya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Di Muhammadiyah itu guru-guru honorernya yang terserap ke P3K itu ada kurang lebih sekitar 3.400 orang yang pada akhirnya Muhammadiyah ini kehilangan guru-guru senior sebanyak 3.400 orang. Ternyata saat ini saya menambah mendapat tambahan lagi bahwa bukan hanya NU dan Muhammadiyah tapi juga ada SMK Penerbangan selain juga sekolah luar biasa.

Saya kira ini saya sangat setuju sekali, nanti di kemudian hari kita memanggil dua Kementerian itu, bahkan tambah lagi Bappenas, bagaimana kita bisa apa yang menjadi problem teman-teman di pengelola SMK Penerbangan ini, bisa mendapatkan solusi yang terbaik saya kira itu, itu untuk penerbangan.

Untuk yang Forum Komunikasi Sekolah SMK Swasta apa Komite Sekolah, ini saya kira yang harus diselesaikan di tingkat internal komite, forum komite ini, ini ada keinginan *penjenengan* semua, bagaimana bahwa SK komite sekolah itu adalah dilakukan oleh gubernur dinas atau segala macamnya, kan tidak lagi oleh kepala sekolah.

Tetapi di halaman selanjutnya *penjenengan* juga mengoreksi bahwa yang menjadikan komite carut-marut ini, bahkan ada istilah komite sekolah preman syariah atau preman hasanah, ini adalah kepala dinas-kepala dinas satu itu. Yang kedua bahwa yang memonopoli persoalan seragam-seragam itu adalah juga kepala-kepala dinas. *Nah* saya kira nanti jangan-jangan nanti kalau SK-nya dari dinas-dinas itu nanti ada monopoli SK juga.

Ini saya kira ini harus dipikirkan betul ya, apakah tetap ada di SK itu di kepala sekolah atau di dinas? Karena ini kan antara halaman 7 yang *penjenengan* kritik ada tentang persoalan kepala sekolah, tetapi di halaman 8-nya justru *penjenengan* ini meminta ee SK itu dari kepala dinas, tapi tadi dalam narasi penjelasan bahwa kepala dinaslah yang membikin salah satu carut-marutnya tentang problem persoalan komite sekolah.

Yang selanjutnya saya kira tentang persoalan SMK Taruna tadi itu, SMK Bhayangkara ini, saya kira tadi juga saya *browsing* itu sangat mahal sekali. Kang Dede, saya kira memang ini yang sering kita dapatkan ini kan SMA SMK sekolah sederajat apa, menengah ini di tingkat kabupaten ini seperti anak tiri kan. Karena ketika kita bawa problem ini di tingkat dinas kabupaten ini selalu dilempar ke provinsi.

Sementara yang sangat kita saya bayangkan ya kalau di Dapil saya itu di krucil yang sangat jauh sekali dari-dari krucil ke kabupaten aja itu dia butuh waktu sekitar 2 jam. Bagaimana kalau hanya persoalan administrasi dia bawa sampai ke provinsi? Ini kan juga problem yang saya kira secara teknis saja ini sudah sangat menyulitkan mereka.

Saya kira ini juga memang harus ada betul-betul tata ulang tentang permendikbud itu yang kedua bagaimana memang posisi atau *positioning* komite sekolah ini betul-betul menjadi wadah apa? Penyambung lidah ya antara kepentingan sekolah dinas dengan siswa-siswi agar betul-betul apa yang menjadi harapan tata sekolah yang lebih baik, siswa yang betul-betul yang kita harapkan ini menjadi sebuah unggulan.

Saya kira seperti itu ini, saya kira ini nanti ke depan juga kita betul-betul berdayakan yang menjadi komite sekolah ini.

Terima kasih, Kang Dede.

f

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (M. MANSYUR):

Izin Pimpinan, izin.

Kami ada SMK Pelayaran mohon dikasih waktu, Pimpinan. Dia banyak anak ini.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik silakan pelayaran.

KOMITE SMK NEGERI I KALIPURO BANYUWANGI:

Terima kasih, Pimpinan.

Kami dari komite SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi, kebetulan kami sekolah kami itu dekat dengan pelabuhan Ketapang yang mau menyeberang ke Bany, Bali. Kami setelah dulu itu berdirinya SMK Negeri 1 Kalipuro itu akan menjadi icon Banyuwangi, satu-satunya SMK Negeri pelayaran yang ada di Banyuwangi. Setelah diambil alih oleh Provinsi Jawa Timur, akhirnya sampai sekarang ini kita itu SMK kami kurang perhatian Pimpinan, mohon maaf.

Jadi sampai hari ini kalau kita rapat dengan Bapak, Ibu wali murid ataupun taruna-taruni ataupun dengan yang lain pasti ditanya, "Pak anak yang bolos itu berapa, yang lewat pagar berapa"? Saya selalu menjawab tidak ada karena kita tidak punya pagar ini. Ini yang menjadi problem, ini saya minta ke siapapun tidak pernah dikasih oleh dinas pendidikan ini.

Karena apa, lulusan kami satu angkatan itu ada 100 yang 90 sudah diterima di dunia kerja di kelautan semua, karena ditunjang oleh namanya sertifikat-sertifikat kelautan. Maka dari itu di sana karena itu terkenal SMK Negeri 1 Kalipuro mahal, penuh kekerasan, itu kalau di-*browsing* di YouTube-nya seperti itu, padahal tidak Pimpinan. Ini, kita tidak pernah narik apapun di wali murid, karena apa?

Minim banget sekolah kami, sekolah kami itu di bawah pohon kelapa paling banyak di sana itu, tidak ada perhatian sama sekali. Bahkan kita pernah mengajukan dari intensi-intasi tidak bisa akhirnya kita minta CSR kemarin, CSR dari PLN. Kita kebetulan ada tetangga kami menjadi Anggota DPR RI, Bapak Sonny dari Fraksi PDI Perjuangan kita minta CSR dari situ, barulah kita dibantu yaitu pagar depan. Itu hanya depan saja dan dibantu oleh drum band itu aja, yang lain kita minta ke Kementerian ataupun di mana pun kita tidak pernah dikasih. Bahkan kemarin baru kemarin saja kita dikasih yaitu mobil dinas itu pun bekas tahun 2028, itu untuk operasional.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Belum 28, Pak.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (M. MANSYUR):

2000 eh iya 2008 ini iya, itu pun masih benar-benar Pimpinan ini. Yang saya minta kami mohon dengan hormat dan sangat tolong kita diperhatikan, jangan di anak tirikan sama dengan yang namanya SMK penerbangan. Kendala satu-satunya dari kami adalah sekolah kami belum bisa *approval*, Pimpinan. Kalau bisa *approval* adalah kita bisa mendirikan diklat sendiri di kampus kita, bahkan kan hari ini kita biaya *approval* itu kurang lebih kurang 130 juta pun kita tidak bisa membiayai itu.

Tenaga kerja gurunya juga seperti itu, guru prodinya tidak ada, guru yang asli kelautan. Sama kendala kami dengan penerbangan, setiap kita nyari guru adalah guru yang benar-benar yang berlayar, nahkoda ataupun teknisi yang ada di pelayaran kita jadikan guru yang namanya guru tamu Pimpinan, itu pun mahal bayarnya kita. Jadi saya mohon dengan hormat dan sangat perhatikan sekolah kami yang ada di Banyuwangi, yang dulunya mau jadikan *icon* ternyata sekarang tidak ada apa-apanya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik, terima kasih masukan ya Pak.

Ini catatan yang sama dengan penerbangan, ya nanti kita masukkan dalam kesimpulan ada beberapa K/L, kementerian/lembaga Teknis yang menyelenggarakan SMK kayaknya perlu sinergi nanti dengan Kementerian Pendidikan ya.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (MUJIONO):

Nambah sedikit, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Sebentar Pak, sebentar.

Kalau temanya masih sama saya soalnya sudah melempar ke anggota ini, temanya masih sama atau *nggak*, Pak?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (MUJIONO):

Beda.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik kita coba ya.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (MUJIONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Tadi yang paling juga *urgent* dalam rekrutmen P3K mohon proporsional. Artinya selama ini rekrutmen P3K itu hanya berorientasi pada tenaga pendidik atau guru, sedangkan tenaga kependidikan dan layanan khusus ya ini terabaikan ini ya. Oleh karena itu, mohon dalam rekrutmen P3K itu, agar juga memberikan kesempatan untuk merekrutmen tenaga kependidikan, karena ini juga sangat dibutuhkan.

Ada di Banyuwangi itu SMK negeri yang tenaga kependidikan administrasi tidak ada yang ASN Pimpinan, baru diberi satu itu pun juga mutasi dari sekolah lain ya. Ini mohon untuk bisa menjadi atensi dari Pimpinan itu dan tambahan hanya sekedar melengkapi yang terkait Taruna Bhayangkara, ini adalah program Jawa Timur, Pimpinan. Jawa Timur pengen ada satu sekolah yang memiliki wawasan khusus nasionalisme kebangsaan dan ketertiban sehingga Provinsi Jawa Timur membuat *pilot project* ada empat Sekolah Taruna yang dibina oleh empat matra itu. Taruna Nala di Malang angkatan laut, Taruna Angkasa di Madiun ini adalah Angkatan Udara, Taruna Brawijaya di Kediri ini adalah Kodam TNI AD dan Taruna Bayangkara di Banyuwangi Polda.

Apa yang menjadi kecemburuan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya itu tadi, adalah dari sisi infrastrukturnya Pimpinan. Ini seolah-olah sangat di anak emaskan oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur karena ini *pilot project*-nya ya digojok tidak hanya ratusan juga miliaran per tahun.

Di satu sisi sekolah-sekolah yang lain seperti yang dikeluhkan teman saya ini sejak berdirinya sekolah SMA 1 Genteng itu baru sekali dapat DAK, yang lainnya itu hanya dapat rehab itu pun hanya 2-3 tahun sekali yang nilainya itu hanya kisaran 100-120 seperti itu Pimpinan. Sehingga mohon nanti Pimpinan bisa memberikan aktuasi bagaimana agar provinsi atau mungkin juga DPR itu memberikan perhatian yang sama agar semua sekolah itu bisa berkembang ya.

Semuanya tanpa harus melihat ini *pilot project* atau tidak, sekolah ini itu binaannya siapa dan seterusnya, agar semua anak-anak kita memiliki

kesempatan yang sama untuk maju dan tidak kalah pentingnya bagaimana membuat biaya operasional sekolah itu jadi sangat murah dan ramah sosial.

Pak Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik, terima kasih banyak Pak.

Memang kalau masalah soal tenaga pendidikan, ini sudah jadi isu di Komisi X kita minta agar slot untuk tenaga kependidikan itu juga dibuka. Jadi bukan hanya untuk pendidik saja tapi tenaga pendidikan juga.

Terkait nanti SMA Taruna Nusantara tentu kita harus *review* lebih jauh karena itu sifatnya adalah provinsi kebijakan provinsi ya, tapi nanti kita akan *review* sama-sama ya.

Pak Nur silakan Pak Nur, setelah Pak Nur Bu Heti, Bu Ledia.

F-PGOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati,

Yang pertama mungkin saya mempertegas apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Aam dari Fraksi Partai Nasdem, terkait dengan problem yang ada di SMK Penerbangan Indonesia.

Jadi memang Pimpinan, kayaknya memang RDP perlu kita lakukan antara Kemendikbud dengan Perhubungan, karena di halaman 8 poin dua di di apa di tayangan itu tayangan nomor dua ini, agak-agak mengkhawatirkan menurut saya *statement* kurikulum di SMK penerbangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tidak diakui oleh Kementerian Perhubungan.

Ini kan bahaya, jadi bagi saya ini *nggak* boleh, karena dalam dalam pikiran saya pun seharusnya *nggak* bisa gitu loh, harusnya disepakati kan. Karena itu dikeluarkan oleh institusi negara dalam satu negara yang sama kecuali misalnya perhubungannya Malaysia, Kemendikbudnya Indonesia kan gitu. *Nah* menurut saya perlu kita perlu RDP ini karena ini menurut saya kuncinya di sini.

Karena ketika kemudian standar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tidak sama dengan Kemen Perhubungan sebagai *user* yang akan menggunakan orang-orang yang akan lulus dari sekolah penerbangan maka dan ini juga akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang lainnya. Penganggarannya segala macam itu akan-akan, *nah* ini menurut saya-saya

penegasan sini saja. Jadi menurut saya RDP perlu kita lakukan karena ini menyangkut 46 SMK, 45 ya? Ya sudah 4, ada 40, 45, tinggal 45 kalimat yang pas kayaknya, yang melibatkan kurang lebih 13.323 siswa, benar Pak ya?

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

Izin, Bapak.

Kalau saya agak bicara ke belakang sedikit Bapak, dulu siswa kita Pak total tuh 24.000 Bapak tahun 2020 sekarang totalnya tinggal 13.000 sekian.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya artinya *positioning* yang sekarang lah ya.

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

Betul-betul, Pak.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

13.323 siswa.

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

Itu data dari Dapodik Bapak, izin.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Oke, jadi menurut saya ini penting kalau ndak ini 13.000 anak-anak kita ini *nggak* jelas masa depannya, kalau kemudian kurikulumnya tidak diakui. Karena ini-ini utama. Jadi menurut saya-saya merekomendasikan ada RDP antara Kemendikbudristek dengan Kemen Perhubungan.

Yang kedua terkait dengan Bapak-Bapak dari komite, jadi ini sesuatu yang baru nih, Pak. Selama ini yang kami dengar, ini tadi saya iseng-iseng saya kirim foto *panjenengan* ke teman saya yang ada di-di apa di Banyuwangi, *nuhun sewu* nggih Pak ya. Ini masalah persepsi sebenarnya.

Jadi kalimatnya apa saya *nggak* perlu sebut namanya lah nanti *jenengan* cari lagi di sana, *nah* tapi ini persepsi yang menurut saya antara yang yang *jenengan* sampaikan dengan yang yang saya tangkap memang agak berbeda, *nuhun sewu*. Jadi oh dengan forum komite sekolah, stempelnya KS untuk narik iuran. *Nah* ini kan persepsi yang muncul di masyarakat ya dengan kemudian yang sekarang *jenengan* keluhkan bahwa sesungguhnya persepsi itu tidak

tidak-tidak-tidak benar kan gitu. Lah iya makanya ini kan ini, karena saya punya pengalaman yang-yang seperti *jenengan* sampaikan tadi itu.

Misalnya saya ini saya kan Dapil Jember Lumanjang ya. Saya ini menyalurkan PIP PIP saya terbesar terserap, terarah, terukur itu melalui komite ya di SMA SMK yang ada di Lumajang khususnya. Di daerah Kecamatan Sunduro itu saya menggunakan komite sekolah untuk menyalurkan program PIP SMA-SMK dan itu lebih terukur, terarah, termasuk kemarin ketika pemilu tahun 2024 suara yang bisa bertanggung jawab dari Sunduro itu, yang dari komite itu. Jadi saya ngasih ada 2.000 PIP saya dapat 1.700 suara di situ, *nah* jadi sebenarnya lebih terukur gitu kan.

Nah jadi memang bagi saya, saya, kami perlu menyampaikan Pak, kami di Komisi X memang sebenarnya sedang mengupayakan terkait dengan dana BOS. BOS ini *insyaallah* *nggak* akan, *nggak* akan, *nggak* akan hilanglah, Pak. Saya yakin hilang gara-gara kemarin ada ribut-ribut urusan dari mana anggaran untuk makan gratis kan gitu, tapi *nggak* akan hilang menurut saya. *Nah* kami ini Komisi X sedang berupaya bagaimana besaran BOS ini kita tambah, karena ini saya pernah ngobrol dengan teman-teman di Bappenas sama Kemenkeu, kebetulan saya di Banggar.

Jadi dana BOS untuk SD saja yang ideal itu paling sedikit 8.700.000 per anak per jenjang per tahun, sekarang 1.000 termasuk juga dengan BOS yang SMA apalagi SMK. SMK itu ada rumus kalau *nggak* salah ditambah set-setelah dihitung-dihitung sama dengan-dengan SMA ditambah lagi pembobotannya 30%. Jadi kalau SD aja 8.700-an maka menurut saya SMK bisa 15 sampai 17 juta per anak per tahun. *Nah* ini sebenarnya salah satu yang jawaban dari kita mencoba untuk mengurangi risiko teman-teman dari komite ini, dari-dari LSM-LSM yang-yang selalu mencari-mencari alasan-alasan kayak gitu itu. Dan bagi saya mungkin memang saya sepakat dengan Pimpinan bahwa Permendikbudnya memang harus kita bicarakan lagi dengan-dengan Mas Menteri.

Karena ini urusan kadang-kadang kan begini Pak, jadi kayak kami ini DPR ini kan diangkat yang nandatangan ini kan presiden sebagai Kepala Negara ya, padahal kerjaan kami adalah mengawasi kan gitu, ya kan, sama sebenarnya problem-nya begitu. *Nah* ini kan perlu perlu pemahaman yang sama juga, kenapa kemudian Kepala Sekolah yang menandatangani komite kan gitu. Kenapa tidak dinas, kenapa tidak yang lain misalnya kan, ini menurut saya memang harus kita samakan. Karena saya, kami misalnya DPR walaupun ditandatangani oleh presiden, ya tetap-tetap kritis terhadap pemerintah kan gitu. *Nah* saya yakin nanti kita akan lakukan apa lakukan klarifikasi dengan-dengan Mas Menteri terkait dengan Permendikbud 75 tahun 2016 khususnya Pasal 6 ayat (3).

Nah yang lain-lain menyangkut zonasi *alhamdulillah* kami di Komisi X juga sudah berulang-ulang kali kita mengingatkan zonasi memang catatannya adalah sebenarnya zonasi ini kan bagian dari jawaban dalam ikhtiar kami untuk kemudian ada pendidikan yang adil, tidak ada favorit, tidak ada favorit gitu, Pak. *Nah* cuma tidak dibarengi dengan peningkatan sarana prasarana pendidikan

yang sama antara zona yang satu dengan zona yang lain kan gitu. *Nah* sehingga kemudian sering terjadi 1 tahun menjelang penerimaan siswa baru ada banyak penduduk baru sekitar sekolahan kan gitu Pak, tiba-tiba ada orang punya KTP sekitar sekolahan yang jaraknya kurang dari 1 kilometer kan gitu. *Nah* hal-hal kayak gini sudah kita sikapi semuanya, termasuk tadi urusan tenaga pendidik yang sudah kita-kita lakukan, termasuk tidak hanya guru tapi tenaga kependidikan ya, tenaga pendidikan juga sudah kita-kita sikapi.

Mudah-mudahan apa-apa yang sudah *jenengan* sampaikan ini betul-betul bisa kita maksimalkan. Separuh sudah kita kita perjuangkan dengan zonasi, dengan apa tadi itu. *Nah* termasuk sebenarnya Sekolah Taruna Pak itu, dapat kuota *nggak* Pak dari misalnya Banyuwangi ada-ada kuotanya *nggak*, misalnya SMA, SMK itu-itu memberikan kuota berapa persen untuk anak-anak.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Mohon maaf Pak saya jawab ya.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Siap.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Jadi yang lebih fatal Pak ketika alih fungsi dari SMA 2 Genteng menjadi SMA, SMA Taruna Bhayangkara dalam satu komplek Pak di situ ada SMP 4 Genteng yang kemudian setiap tahun siswa kelulusannya tidak ter-cover Pak, tidak bisa sekolah di SMA Taruna Bhayangkara sehingga ini menjadi kawasan yang *blank school area*.

Kalau dulu Pak ketika mereka lulus di sebelahnya ada SMA 2 Genteng yang secara otomatis zonasi saja pasti diterima, sehingga ini yang menjadi beban mental dan psikis Pak anak-anak yang lulus dari SMP 4 Genteng. Ini dalam satu komplek Pak hanya berjarak sekian meter, ini yang menjadi soal.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Makanya saya bertanya, ada kebijakan apakah dari dinas pendidikan Jawa Timurnya atau.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Tidak ada, Pak.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Tidak ada ya?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Tidak ada, sistemnya beda Pak untuk rekrutmen siswa, berbeda sekali.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Oke siap, itu nanti jadi catatan kami, karena harusnya ada. Misalnya jalur prestasi kan, misalnya dia prestasi akademik atau segala macam.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Tidak ada Bapak, tidak ada.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Jadi saya pikir itu nanti menjadi catatan kami.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (YUDIANTO):

Sehingga ini yang menimbulkan *blank school area* di beberapa wilayah yang ada di sekitar SMA 2 Genteng, Bapak.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Oke-oke-oke.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (M. MANSYUR):

Ngampunten.

Dulu ada SMA 2, SMA 1, SMA 2 itu aja masih problem kurang sekolahnya itu Pak, malah dikurangi satu diubah menjadi SMA Taruna Bhayangkara. Jadi malah menumpuk di sekolah kami, sekolah kami ini sejak dulu favorit, harapannya ada pemerataan pendidikan ditambahlah SMA itu, dulu SPG Pak sekolah itu terus kemudian dijadikan SMA 2 Genteng.

Ada dua sekolah itu di tingkat itu kurang, masih kurang, malah diistimewakan jadi satu dirubah dari SMA menjadi SMA 2 Taruna Bhayangkara. Problem-nya di sekolah kami ini dalam dalam tiap PPDP itu yang daftar kurang lebih 1.500 sampai 1.600 anak, tapi yang diterima di kami hanya 12 rombel kurang lebih 360 aja Pak, maksimal kan sudah. *Nah* ini problem-nya kan berebut kursi yang tidak sehat di situ.

Terima kasih.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Oke terima kasih, cukup Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Cukup ya. Kalau sekelihatannya sebetulnya begini, kalau masalah soal SMA yang berkaitan sama angkatan, menurut saya juga itu bagus juga, karena ujung-ujungnya adalah penyerapan yang masuk ke TNI Polri, tapi isu anak-anak yang lain juga harus mendapatkan hak yang sama ya itu nanti *domain* adalah nambah sekolah ya kan. Kalau menurut-menurut saya ya itu kita dorong nanti ke provinsi untuk nambah sekolah yang penting tanahnya ada, *nah* itu kan hak-hak di pemerintahan daerahnya. Jadi *nggak* boleh sampai nanti anak-anak SMP itu malah keleweran ke sana kemari gitu ya.

Baik Ibu Ledia silakan doa penutup eh salah.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Yang penting bukan doa berbuka puasa, Pak.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ledia Hanifah, Fraksi PKS Dapil Jawa Barat 1 Kota Bandung, Kota Cimahi.

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X,
Bapak, Ibu para tamu,
Hadirin yang berbahagia,**

Ada, saya hanya ingin menambahkan catatan saja, pertama kasus seperti SMK Penerbangan ini Pak Ketua sebenarnya sama seperti kasus SMK Kesehatan dengan, dari sebelum adanya Undang-Undang tentang Kesehatan yang terbaru itu problem-nya adalah SMK Kesehatan itu yang juru program studi keperawatan dia hanya jadi asisten keperawatan. Karena dalam Undang-Undang keperawatan kan disebutkan bahwa yang disebut sebagai perawat itu minimal D3. *Nah* sampai saat ini-ini masih jadi problem, ditambah kita juga perlu berbicara dengan Kementerian Tenaga Kerja karena Kementerian Tenaga Kerja punya standar yang berbeda, SMK Keperawatan dikirim ke luar negeri padahal standar di dalam negerinya tidak dibenarkan harus D3 gitu jadi banyak yang *nggak* ketemu.

Ini mungkin kejadiannya hampir sama sejenis dengan yang di penerbangan karena komunikasi dengan Kementerian Perhubungan yang tadi bermasalah. Kita belum mendapatkan satu apa kesepahaman sebenarnya standar yang diperlukan seperti apa. Jadi kalau memang katakanlah tadi minimalnya harus D1, tentu ada ruang yang harusnya diberikan di SMK itu klasifikasinya, klasifikasi kompetensinya seperti apa.

Saya bisa membayangkan SMK penerbangan ada guru yang tidak pernah memegang pesawat gitu, kan repot kalau kayak gitu. Mungkin kalau guru regulernya masih bisa dipahami guru matematika, bahasa, dan seterusnya, tetapi memang diperlukan ada guru produktif. Guru produktif inilah yang pasti sangat mahal gitu ya, karena mereka pasti masih punya profesi. Kecuali mereka mau katakanlah sebagai apa ya CSR pribadinya mereka gitulah. Artinya mau berbuat baik gitu, *nah* itu kecuali kalau seperti itu, *nah* ini catatan pertama saya.

Catatan kedua adalah di dalam program Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang SMK pusat keunggulan ke SMK di prodi-prodi yang ada di SMK Pelayaran itu masih mendapatkan perhatian untuk bisa diusulkan sebagai SMK pusat keunggulan, tetapi di penerbangan tidak ada prodi yang diusulkan. Jadi kemungkinannya dugaan saya karena tadi masih belum ada kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan, saya pikir barangkali yang pelayaran itu masih ada, sudah ada kesepahamannya. *Nah* karena ketika kita bicara dengan penerbangan kalau SMK otomotif itu masih mudah dulu pakai kijing kotak sekarang yang sudah elektronik, *nah* sekarang kalau penerbangan nyari pesawat yang begitu di mana gitu kan. Apalagi sekarang ruang-ruangnya sudah sangat cepat berubah dengan pendekatan yang *computerized*, jadi memang tidak-tidak mudah.

Ketiga, barangkali ketika kita bicara soal *ground handling*, *ground handling* yang seperti apa yang diharapkan. Terus kemudian elektronik aviasi, Bapak saya dulu Kepala Balai Elektronik di Kementerian Perhubungan Udara jadi agak-agak nyambunglah yang begitu-begitu. Urusan-urusan radar elektronik di landasan dan segala macam itu kan juga perlu keterampilan khusus. Saya ingat dulu Bapak saya tu terpaksa harus melatih lulusan-lulusan SMK elektro dia harus terus-menerus gitu ya. Jadi apa *nggak* bisa, *nggak*, memang tetap harus dilatih karena spesifikasi kebutuhan yang berbeda saya pikir ini menjadi bagian yang juga harus diperhatikan.

Yang berikut terkait dengan komite sekolah. *Nah* komite sekolah ini Bapak-Bapak, memang apa ya tidak semua orang yang menjadi komite sekolah itu memahami posisinya beliau seperti apa. Sehingga kan sebetulnya meskipun beliau bukan pendidik beliau mestinya memahami apa sih kurikulum yang sedang dipergunakan di sekolah, masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Sehingga cap, yang tadi disebutkan komite sekolah itu cuma stempelnya kalau ada pungutan-pungutan itu akhirnya jadi tersuarakan dengan cukup merata, karena banyak yang tidak paham tugasnya mereka sebetulnya apa.

Kami mencoba nih misalnya, saya dicoba dicoba didapil saya komite-komite sekolah itu disertakan dalam pelatihan-pelatihan bersama dengan guru dan tenaga kependidikan supaya ngerti sebenarnya kependidikan di kita tuh maunya seperti apa. Agar kemudian benar-benar bisa saling bekerja sama, saling bisa meningkatkan, problem-nya kan tidak semuanya, belum semuanya. Jadi dan sempat ada rumor, sempat ada rumor apa komite sekolah akan dibubarkan, teman-teman dari asosiasi komite sekolah di dapil saya langsung menemui saya minta supaya itu tidak dibubarkan. Karena ada sejumlah

sekolah yang justru komite sekolahnya itu sangat membantu sekolah-sekolah itu bisa dipahami. Jadi memang apa namanya rumor yang tidak benar ya sampai sekarang kan kita masih tetap ada.

Nah hal yang penting bagi kita adalah mensosialisasikan juga kepada teman-teman yang menjadi pengurus komite sekolah supaya memahami juga tentang bagaimana perjalanan. Betul semua kalau ditanyakan kebutuhan pendidikan itu pasti besar biayanya dan tadi BOS-nya SD saja cuma 900.000 sementara ke kebutuhannya 10 kali lipat dari itu. Jadi kita masih harus terus apa namanya? Kami ini PR kami ini bagaimana membuat supaya kita punya kesepakatan satuan, harga satuan istilahnya mungkin ya, harga satuan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia tuh sebenarnya berapa sih gitu. Dan itu pasti tidak bisa cuma sekedar SD, SMP, SMA, karena ada SD kelas 1 yang tidak sama dengan SD kelas 6, belum kelas 7 dengan kelas 9, kelas 8, ini juga *nggak* sama pasti.

Nah jadi ditambah dengan kurikulum yang disosialisasi dengan pendekatan P5 itu lebih banyak bebannya kepada orang tua. Jadi keluhannya orang tua itu adanya di situ, betul *nggak*, Pak? Ya meskipun saya sudah *nggak* jadi komite sekolah. Masih banyak sekali laporan-laporan dari lapangan persoalannya di situ Kang Dede dan itu tidak ter-cover oleh BOS dan P5-nya sekolah cenderung untuk berpikir *outing*, kalau *outing* berarti kan ada pengeluaran tambahan. Ada orang tua yang lapor ke saya, "Bu saya tuh *nggak* punya uang penerima PIP, *nggak* punya uang untuk ikut *outing*. Jadi anak saya *nggak* ikut *outing*, dikasih tugas tugasnya harus dikerjakan sendiri dengan biaya yang lebih besar dari *outing*, jadi sama juga bohong, sama aja *nggak* bisa gitu".

Jadi apa sudut pandang Bapak, Ibu guru di sekolah juga terkait dengan P5 Ini mesti diluruskan. Artinya bahwa ya memang paling gampang ya kalau mau jalan-jalan ya *outing* aja udah keluar gitu, padahal kan itu punya apa pengeluaran biaya yang lebih besar lagi. *Nah* jadi kita masih perlu menduduk bersama-sama, ada hal-hal yang masih harus kita luruskan nanti masukan-masukannya sangat baik terima kasih menjadi bahan bagi Komisi X.

Saya rasa itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Terima kasih, Bu Ledia.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Memang isu yang soal SMK ini akan menjadi perhatian kita ya karena ternyata bukan hanya kelautan, penerbangan, ada lagi kesehatan, farmasi.

Nah konteksnya semangat kita ini mendorong SMK ini adalah daya serap di lapangan kerja, jadi *output*-nya adalah mereka terserap di dunia kerja. Kalau sampai SMK ini *output*-nya hanya 15% yang terserap berarti SMK tidak berhasil. Itu sebabnya kami sebetulnya dengan Kemendikbud ini sudah punya kesepakatan, kita dorong vokasi. Vokasi ini menjadi penting agar tidak terlalu banyak siswa-siswa kita akhirnya menjadi pengangguran.

Nah jadi kita akan menawarkan kepada kawan-kawan nanti bagaimana kita akan memanggil beberapa K/L lainnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kesehatan, Farmasi atau Kementerian teknis lainnya. Karena yang paling penting tadi kurikulumnya harus *link and match* dong, harus sesuai dengan kebutuhan industri ya kan. Yang kedua juga bukan hanya itu, guru-guru yang ngajar juga harus kompeten, harus ada lisensinya. Ya kalau berbiaya berarti pemerintah harus ikut bertanggung jawab dalam konteks ini ya.

Ini akan kita jadikan isu yang menurut saya harus kita segerakan, karena khawatirnya tadi anak-anak kita karena *grade* industri sudah meningkatkan apa *grade* penerimaannya menjadi D3. Paling tidak bagaimana adik-adik kita yang SMK ini tetap terserap pada Eselon yang, bukan Eselon, apa sih namanya tuh, level-level yang di bawah itu ya. Karena bagaimanapun juga jangan sampai ambil SMK penerbangan kerjanya katakanlah mungkin di sektor perkebunan kan *nggak - nggak* nyambung gitu ya. Ya terima kasih masukan ya nanti kita akan jadikan bahan.

SEKRETARIS JENDERAL FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN INDONESIA (FANI DESIYANTO):

Izin Pimpinan mau menambahkan sedikit.

Jadi dari apa yang sudah kami dapatkan dan kami juga melakukan sedikit apa pendekatan dengan teman-teman di industri penerbangan sebenarnya mereka itu lebih membutuhkan lulusan SMK penerbangan, Bapak Pimpinan izin. Dikarenakan apa, pada satu kasus pernah terjadi anak yang lulusan diploma pada saat suruh mengerjakan tugas yang SMK, dia nyampaikan itu bukan tugas saya itu tugas SMK. Jadi suruh aja Pak yang SMK itu, itu yang disampaikan dari teman-teman di industri, Pak.

Nah justru dari industri sendiri menyampaikan ke kami Pak coba tolong sampaikan ke atasan kami kami itu butuh lulusan SMK sebenarnya untuk *helper*, minimal *helper* gitu sebenarnya itu, Pak. Jadi sebenarnya lulusan kami itu dibutuhkan cuman karena kami terganjal dengan regulasi, Bapak izin.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Iya Pak Baik dipahami Pak, itu sebabnya tadi *demand and supply*-nya sebetulnya ada, bukannya *job*-nya tidak ada tapi regulasi yang membuat ini *nggak* bisa tembus. *Insyallah* kalau itu lebih mudah kita mintakan pemerintah untuk berkoordinasi.

SMK PENERBANGAN DANAN SIDOARJO:

Mohon izin Pimpinan menambahkan.

Kami dari SMK Penerbangan Danan Sidoarjo yang kebetulan Yayasan kami Yayasan Pepabri, Bapak. Jadi terkait dengan tenaga pengajar untuk produktif atau kejuruan, ini selama ini dipenuhi dari guru-guru kami permohonan di instansi TNI untuk mengajar itu bahwa, guru kami betul-betul memegang pesawat sesungguhnya. Namun dengan berjalanya waktu dengan usia-usia sebelumnya maka kami juga kesulitan untuk mencari guru itu. Kami juga solusi mencari ke para purna dari merpati itu bisa masuk akhirnya. Namun kalau kita mengharap itu kan kita tidak ada guru-guru yang muda jadi dapatnya guru-guru yang sudah purna tugas itu, jadi itu.

Kemudian serapan kami mulai 2004 itu kami masuk di Garuda itu selalu banyak itu, Bapak. Kemudian untuk memenuhi alat praktik, *nah* ini selama ini kebetulan kami itu didukung dari penerbangan TNI AL. *Nah* kemudian sampai saat ini kan masih kurang itu Bapak. Jadi mendapatnya kami itu mungkin dari pesawat atau peralatan yang di-*grounded* atau habis jam terbangnya itu bisa dibahkan ke sekolah-sekolah kami itu Pak. Ini harapan kami bisa mendorong kami sudah berupaya permohonan di KSAL sudah turun namun terganjal di karena terkait dengan Permenkeu tentang aset, *nah* itu yang jadi kendala, ini mohon jadi cara kami bisa disampaikan Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Iya, masalah ini nanti kalau sudah ketemu Kemendikbud dengan Kementerian lainnya mereka akan bikin MoU. Karena kalau diselesaikan masalah Kementerian Keuangan bukan di Komisi X Pak, tapi kalau antara Kemendikbud-nya nanti dengan Kementerian lain terkait kan ujung-ujungnya Kemenhub, nanti bisa minta. Tolong dong barang-barang ataupun juga peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai bisa dikerjasamakan dengan SMK-SMK yang penting peraturannya dulu kita benahi, gitu Pak ya.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (REDI):

Sedikit menambahkan, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Ya gimana, Pak?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (REDI):

Baik, gini. Perkenalkan saya Pak Redi dari SMK Penerbangan Aero Dirgantara Tangerang, Kabupaten Tangerang di Karawaci. Ini kami *alhamdulillah* di lulusan SMK kam ini baru angkatan pertama ini diterima di

Bandara Narita Jepang melalui kerja, program kerja selama 6 bulan pendidikan bahasa Jepang. *Nah* namun terkendala mengenai biaya karena ini mandiri. *Nah* kemarin mohon dibantu untuk bantuan dari pemerintah untuk diklatnya atau biaya pembiayaannya mengenai daya serapnya.

Yang kedua, alumni kami pun tidak hanya di industri penerbangan. Karena kami semi militer rata-rata SMK penerbangan ini ada yang masuk ke jadi polisi, ke TNI angkatan darat, AU, *nah* tapi kami terganjalnya di Akmil Pak di Akmil ini kan pasti SMA yang dibutuhkan. Kemarin ada murid kami sudah 1 tahun di kami, ternyata dia pengen ke Akmil ayahnya karena tidak bisa kalau dari SMK. *Nah* mohon dibantu apakah nanti ke depannya kebijakannya untuk SMK penerbangan khususnya itu bisa diterima di Akmil, Akademi Militer.

Terus yang ketiga, satu lagi terakhir tentang sertifikasi guru. Guru kami kemarin dapat beasiswa di tahun 2018 itu ke Airbus Perancis selama 2 bulan, itu padahal sarjananya sarjana MIPA Kimia tapi karena sering ikut diklat penerbangan di PRDI, di GMF, di Garuda, namun ketika mau sertifikasi guru Kemendikbud itu tidak berlaku. Tolong dibantu nanti makanya nanti duduk barang antara Kemenhub dengan Kemendikbud supaya diakui diklat-diklat sertifikat untuk penerbangan. Walaupun di Sarjanasebelumnya dia sarjana kimia, tapi karena sudah sering memegang pesawat dan ini *alhamdulillah* guru kami ini sudah dimasukkan dalam grup produktif penerbangan dan kami dibantu oleh guru tamu ada sistem *shift game* artinya guru-guru kami diwajibkan diklat dengan guru tamu tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik, untuk kawan-kawan dari komite, isu yang saya tangkap yang mungkin bisa kita nanti kasih dalam kesimpulan adalah bagai, ada Permendikbud mengenai komite ini harus jelas, harus tegas. Karena banyak yang mengasumsikan komite itu adalah sesuatu yang tidak memiliki payung hukum sehingga oleh lembaga-lembaga lainnya belum diakui ya. Ini kami akan mintakan agar ini disosialisasikan oleh kementerian atau dipertegas lagi fungsi komitenya ya. Terkait dengan tugas komite yang juga amat sangat berat yang kita pahami karena kita juga dapat laporan dari mana-mana itu tentu juga harus kita dudukkan bersama-sama sampai batas mana.

Kalau tiba-tiba komite dibebankan oleh sekolah “ini kita perlu bangun tiga lantai ini ke atas gitu”. Ini kan menurut saya sesuatu yang enggak masuk di akal yang mestinya itu adalah peran negara di situ bukan peran serta masyarakat ya. Jadi kita harus dudukkan masalah ini, nanti kita akan mintakan kepada Kemendikbud juga untuk mempertegas, jangan sampai kawan-kawan semua nanti jadi objek *bullying* lagi ya kan ya.

Saya akan membacakan kesimpulan buat Bapak, Ibu semua. Tentu kalau namanya kesimpulan ini tidak akan memuaskan keinginan semua Bapak, Ibu tetapi kita harus lihat dari sisi kewenangan kami yang mana merupakan

kewenangan kami yang di luar kewenangan kami kayak Kementerian Keuangan dan lain-lain itu tentu kami tidak bisa melakukan ya.

Draft kesimpulan pada hari ini adalah:

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Forum Komite Sekolah Menengah dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasi sebagaimana terlampir dalam bahan paparan, beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian adalah:
 - a. Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia Kemendikbudristek bekerja sama Pemda, bekerja sama dengan Pemda maksudnya, melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkelanjutan upaya satuan pendidikan kejuruan khususnya bidang aviasi, ilmu penerbangan. Agar mampu beradaptasi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Ini yang baru apa yang lama nih? Ini yang baru ya, khususnya dalam hal pengembangan kurikulum peningkatan keterampilan *up skilling* pendidik dan peserta didik, revitalisasi sarana prasarana, kerja sama dengan Dudi. Lalu kemudian.
 - b. Forum komite sekolah menengah dan kejuruan Kabupaten Banyuwangi:
 - i. Kemendikbudristek meninjau kembali pengaturan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah terkait beberapa substansi mengenai penetapan komite sekolah, peran komite sekolah dalam pengelolaan sekolah bidang non akademik, proses pemenuhan kebutuhan siswa pasca PPDB, jalur komunikasi antar pemangku kepentingan pendidikan di daerah atau Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan komite sekolah.
 - ii. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah terkait tugas dan fungsi komite, komite maksudnya ya, komite sekolah dalam pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk bekerja sama dengan K/L teknis antara lain; Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, terkait pengembangan kurikulum, standarisasi lulusan pendidikan kejuruan vokasi dan daya serap lulusan di Dudi.
3. Bahan paparan yang disampaikan Forum Komite Sekolah Menengah dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMP Penerbangan Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan.

Ini adalah draft kesimpulan, dari anggota tambahan? Mas Nur paham, cukup? Mau ditambah Kementerian lainnya nih, ini sudah ada kesehatan apa ada Kementerian lain? Bappenas perlu *nggak* Bappenas? Apa Kementerian tenaga kerja? Karena vokasi itu larinya tenaga kerja ya, coba ditambah dan Kementerian Tenaga Kerja. Karena saya tertarik kalau perawat itu memang dikirim ke Jepang ya, ada yang proses magang. *Nah* sementara tadi ada yang di sini malah *nggak* diterima ya. Jadi antara lisensi kebutuhan internasional ini ternyata lebih mudah daripada kebutuhan lokal. Pak Fikri ada tambahan?

Baik, silakan kawan-kawan apa ada tambahan di sini? Dari komite? Baik-baik, jadi sebentar, tadi di dalam Permendikbud atau di Undang-Undang Sisdiknas, oke, baik-baik, baik, maksudnya kurang kuat gitu meskipun sudah tersosialisasi. SE? Surat edaran siapa? Coba kita tulis saja.

Meninjau Undang-Undang Sisdiknas Pasal 56 ayat (1) untuk meninjau, bukan meninjau *sorry*. Ini kan maksudnya amanat komite dewan pendidikan itu mestinya diatur di dalam Perpres tapi yang keluar adalah Permendikbud, Perpresnya *nggak* ada kira-kira gitu kan? Padahal itu amanat undang-undang. Kita itu harus membela undang-undang. Jadi bukan meninjaulah apa yang namanya ya, mengevaluasi mungkin ya, mengevaluasi ya. Peninjauan ketentuan dalam Kemendikbudristek tentang kebijakan sekolah ya baik, disesuaikan ya, disesuaikan berdasarkan undang-undang ya.

Oke baik ya nanti karena ini pembahasan yang belum pernah secara mendetail ya tapi nanti kita akan pelajari tentang Undang-Undang 20 tahun apa nomor Pasal 56-nya ini. Apakah jika ada ya itu memang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan Perpesnya ya tapi kita akan lakukan peninjauan ketentuan dalam Kemendikbud Ristek, begitu Pak?

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (REDI):

Mohon izin tambahan, Pimpinan.

Kementerian Pertahanan mungkin boleh dimasukkan, karena daya serap alumni bisa perawatan untuk pesawat-pesawat TNI. Yang kedua juga alumni kami juga kan semi militer ada yang masuk ke Polri, TNI, jadi tolong dimasukkan Kementerian Pertahanan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Kementerian Pertahanan ada SMK pertahanan kah? Ini *nggak* ada konteksnya Pak, kalau cuman tadi masuk ke ke TNI itu bukan *domain* di kami Pak. Kecuali ada SMK Pertahanan ya itu bisa kita masukkan, ini kan konteks kami adalah Kemendikbud begitu ya Pak, dari komite cukup? Ya.

ANGGOTA KOMITE KABUPATEN BANYUWANGI (SUPRIYADI):

Bahwa Komisi X mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengevaluasi keberadaan kacapdin Banyuwangi.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Nah itu nggak bisa masuk domain kita Pak, itu domain-nya pemerintah daerah. Karena ini kan hanya laporan dari Bapak kita nggak mungkin kita hanya menerima laporan kita evaluasi beliau kan. Saya pikir yang paling penting adalah pimpinan daerahnya yang mengevaluasi, kami mengevaluasi kementerian gitu Pak ya baik. Cukup kawan-kawan komite? Cukup ya, baik.

Kawan-kawan yang terhormat,

Jadi dengan demikian RDPU ini sekali lagi adalah menjadi bahan rujukan kami nanti untuk menyampaikan pada pihak kementerian.

WAKIL KETUA FKSMKPI (YAHYA):

Izin Pimpinan, izin.

Untuk penambahan kompetensi guru Pak di apa tadi di kesimpulan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Coba tayangkan kembali kompetensi guru, yang mana Pak? Sudah? Sudah Pak ya? Ada tambahan?

ANGGOTA FKSMKPI:

Izin, Pak. Saya aja menambah maksudnya mewakili Pak Yahya. Untuk penambahan dari kementerian mungkin boleh ditambahkan Pak, Kementerian Keuangan karena setahu saya pada saat ke GMF itu mereka kesulitan pengeluaran *scrap-scrap* pesawat ataupun barang-barang yang tidak terpakai itu menyangkut pajak atau aset dan lain-lain Pak yang menyangkut dengan keuangan negara.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Jadi saya mau cerita dulu kepada Bapak, Ibu semua.

Kalau kami manggil Kementerian Keuangan kami harus minta izin Komisi XI, manggil Kementerian Perhubungan harus izin Komisi V, Kementerian Kesehatan izin Komisi IX. Ini pasti agak sulit tetapi kalau kita bicaranya sektor pendidikan ansih, maka biasanya nanti yang dipanggil itu bukan Menteriya tetapi biasanya dirjenya yang terkait pendidikan. Kira-kira itu Bu, kalau langsung ke pajak dan sebagainya nanti kita titipkan ke Kementerian Pendidikan saja ya. Ini saya yakinlah, kita sedang mendorong nih pajak pendidikan kalau bisa 0%, kami maunya demikian. Ya supaya Bapak, Ibu

tidak terbebankan lagi untuk membayar pajak bangunan, pajak ini ketika menyelenggarakan pendidikan, ini lagi kami perjuangkan juga.

Cukup ya Bapak, Ibu? Cukup Bapak, Ibu semua? Baik.

Dengan demikian maka kita sudah mendapatkan satu kesepakatan bahwa kita akan teruskan pembicaraan ini kepada pembicaraan tingkat Kementerian. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu terutama yang jauh-jauh ya, yang mungkin ada juga yang tadi dari, dari mana tadi Aceh luar biasa. Jalan-jalan, *monggo*, nanti setelah saya tutup kita lakukan penyerahan ya.

Untuk itu sebagai kata-kata penutup kami persilakan dari forum SMK dan forum komite untuk memberikan *statement-statement*.

Silakan Pak.

**KETUA FORUM KOMITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERBANGAN INDONESIA (MAKMUR SYUKRA):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kami bangga dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ini, mudah-mudahan dapat menjadi kemajuan SMK Penerbangan ke depan dan dapat perhatian dari pemerintah hendaknya, itu sekali.

Terima kasih mohon maaf atas kekurangan kami.

Demikian, Pimpinan.

KETUA FORUM KOMITE SMA BANYUWANGI (MISNADI):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi X dan Anggota sudah memberikan kesempatan kita ketemu di sini, sehingga misi yang saya bawa dari Banyuwangi ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sifatnya nasional karena komite sekolah itu sangat membantu.

Sekali lagi, di Banyuwangi itu adalah peningkatan mutu pendidikan itu semua fasilitas itu adalah komite sekolah sehingga banyak sekolah-sekolah yang mengadakan studi banding di Banyuwangi tentang komite sekolah. Sehingga sampai saya menjadi narasumber di Yogya hanya diminta memberikan pemaparan peran komite dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan salah satu dari Yogya sudah ada yang studi banding di Banyuwangi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Kayaknya kita perlu studi banding ke Banyuwangi juga kayaknya, siapa dapil sana ya, *nggak* ada ya?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Banyuwangi lebih enak nih karena punya Menteri kan?

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Kita pernah ke sana tapi urusannya pariwisata belum pendidikan nanti kita coba ke sana lagi deh.

F-P.NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, SP.):

Pimpinan sebentar saya ingin memperjelas tentang komite.

Bapak, Ibu sekalian,

Jadi tadi yang diperjelas oleh Pimpinan itu saya ingin tegas, mempertegas kembali bahwa, Komisi X itu mitra kerjanya ada empat, satu Kemendikbudristek, kedua Kementerian Pariwisata, ketiga Menpora, keempat Perpustakaan Nasional. Oleh karenanya kalau kami mengundang kementerian lain misalnya kementerian keuangan itu ada di bawah mitra kerja di Komisi XI, jadi kami harus izin terlebih dahulu dengan teman-teman di Komisi XI.

Beberapa kali kasus, ke Pimpinan DPR juga, beberapa kasus kami kaitannya dengan P3K itu kami sudah berkali ngundang Kementerian Keuangan tapi tidak dapat izin sinyal baik dari Komisi XI dan Pimpinan DPR. Jadi tidak pernah datang juga ke sini, begitu juga kalau kami mengundang Kementerian Tenaga Kerja itu harus izin ke melalui ke Komisi IX. Jadi itu kode etiknya seperti itu, jadi hal-hal terkait seperti itu saya kira mohon dimaklumi, jadi bukannya kami mempersulit tapi memang tupoksinya seperti itu, jadi itu penegasan dari saya.

Makasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI):

Baik, terima kasih Pak Aam.

Alhamdulillah kita sudah lewat waktunya dari jam 1 saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semua, mohon maaf ada rombongan lain sudah menunggu di depan, kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca hamdalah.

Selanjutnya silakan yang mau memberikan buku akte notaris dan terima kasih kepada Bapak, Ibu semua, selamat jalan, selamat berbuka puasa.

(RAPAT DITUTUP)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

TTD

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**